

**SUATU ANALISIS TENTANG PELUANG DAN TANTANGAN
DEMOKRATISASI DI REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Jurusan Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin*

Oleh :

YERRY MAMA HIT PADUNGGE

E 131 04 019

1 - 12 - 08

baezpul

1 sks.

1 sks

267

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : SUATU ANALISIS TENTANG PELUANG DAN
TANTANGAN DEMOKRATISASI DI REPUBLIK
RAKYAT CINA (RRC)

NAMA : YERRY MAMA HIT PADUNGGE

NIM : E 131 04 019

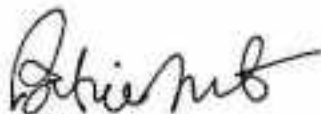
JURUSAN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 28 November 2008

Mengetahui:

Pembimbing I



Drs. Patrice Lumumba, MA
NIP. 131 658 796

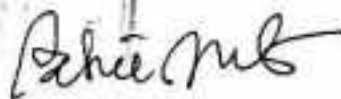
Pembimbing II



S. M. Noor, S.H, M.H
NIP. 131 802 880

Mengesahkan,

Ketua Jurusan,



Drs. Patrice Lumumba, MA
NIP: 131 658 796



HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Judul Skripsi: **Suatu Analisis Tentang Peluang dan Tantangan Demokratisasi di Republik Rakyat Cina (RRC)**, untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Politik Pemerintahan, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 28 November 2008

Menyetujui:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------|--|
| 1. Prof. DR. H. Mappa Nasrun, MA | (Ketua) | 1.  |
| 2. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si | (Sekretaris) | 2.  |
| 3. Drs. Patrice Lumumba, MA | (Anggota) | 3.  |
| 4. Agussalim B. S.IP, MIRAP | (Anggota) | 4.  |
| 5. Drs. Aspianoor Masrie | (Anggota) | 5.  |

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada **TUHAN YESUS KRISTUS** atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih dalam konteks yang sangat sederhana karena kemampuan menuangkan ide-ide dan konsep pemikiran dalam bentuk sistematis dan wadah yang penulis miliki masih sangat kurang. Namun berkat suatu ketekunan serta bantuan dari berbagai pihak dengan harapan semoga semua ini dapat memberikan manfaat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun usaha yang penulis lakukan telah maksimal namun hambatan dan kesulitan yang penulis jumpai dalam proses penyusunan skripsi ini tetap ada, akan tetapi berkat doa, kesabaran dan usaha serta bantuan, bimbingan dan dorongan baik moril dan materiil dari berbagai pihak akhirnya hambatan dan kesulitan yang ada dapat diatasi.

Oleh karena itu, patut kiranya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang memberikan bantuan dan dukungan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B, Sp.B.O** beserta para jajarannya.

2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS, **Deddy T. Tikson Ph.D** beserta para jajarannya.
3. Bapak Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Bapak **Drs. Patrice Lumumba, MA** beserta para jajarannya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Staff Pengajar pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional yang telah membagi pengetahuan dan wawasannya sejak penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin yaitu: **Prof. DR. J. Salusu, MA, Prof. DR. H. Mappa Nasrun, MA, Drs. Patrice Lumumba, MA, Drs. H. Darwis, MA, Drs. Muliadi Sukardi, M.Si (Alm), Drs. Aspianoor Masrie, Drs. M. Imran Hanafi, MA, M.Ec, Drs. Nasir Badu, S.IP, MA, Seniwati S.Sos, M.Hum, Drs. Hussain Abdullah, Drs. Munjin Syafik Asy'ari, Ishak Rahman, S.IP dan Agus Salim B. S.IP, MIRAP.**
5. Seluruh Staf Pengajar Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. khususnya **Bunda yang Sabar n K'Rahma yang Selalu Punya Waktu.** Terimakasih atas segalanya ya...
6. Pembimbing I, Bapak **Drs. Patrice Lumumba, MA** dan pembimbing II Bapak **S. M. Noor S.H, M.H,** terima kasih atas bimbingan dan kesediaan waktunya.
7. Keluarga penulis, **Opa Enos, Oma Marie, Papa Pei, Mama Mei, Pendeta Adrian, Ferry, Ruth, Ria Kadang, Keluarga Malo, dan Keluarga Mamahit-Manahampy.** Terima kasih atas semua dukungannya ya ☺

8. Senior-senior HI, **K'Kasim, K'Bobby, K'Dave, K'Dedy, K'Rio, K'Acep, K'Dey, K'Andika, K'Anca, K'Adit, dan K'Iqqo.** Teman2 seperjuanganQ, **Malbas the Phenomenon, Aswin the Boss, Farda the Chubby, Ignaz the El Che, Ridwan the Activist, Ucok the Preman Batak, Asila the Pancasila, Arni the Industrious, Gusti the Tatorz Bad Boy, Ido the Smartest, Nurda the Patrik, Yulia the Best, Irma the Kind Hearted, Irene the Singer, Ester the Faithful, Mamet the Drummer, Nuly the Energetic, Marissa the Understanding, Fera the Veve, Yuyun the Mommy, Juned the Junzu, Jule the Acceptable, Andini the Cuekz, Awal the Firtatious Tentor, Rhu2 the Cutest, Dewi the Gooddes, Ijat the M.U. Maniac, Sherly the Anti Feminin, Mita the Bondeng and someday you will be a butterfly;> , Rina the Softball Idol, dan Sukma the Reporter.** Terima kasih atas semua dukungannya ya...
9. Teman-teman PMKO, **K'Etu, K'Ipto, K'Ovel, Ido, Irma, Yulia, Irene, Gusti, Ucok, Anthony, Pian, Robert, Eka yang Baik** dan semua teman-teman yang gak bisa kusebutkan satu persatu...
10. Teman-teman KKNq, khususnya yang seposkoq **K'Ical, K'Wendra, Anti, dan Lucy.** Dan terimakasih atas segala bantuan buat **Hj. Ekka Bondeng** dan perhatian dari Ibu Desa Tajong, Kecamatan Tellu Siattinge, Bone, **Puang Besse**

11. **Keluarga Besar Angkatan 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008 HIMAH**I, yang terlalu banyak untuk saya tuliskan namanya satu-persatu. **Kebanggaan tersendiri menjadi bagian dari kalian.**
12. *To my beloved HIMAH*I, yang telah menjadi sesuatu yang berharga dan dan selalu menjadi kebanggaan penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang tidak dapat dituliskan satu-persatu.
14. *Thank u* ya, **C.R.P.I.** ☺

Dan tidak lupa penulis mohon maaf jika dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya penulis berharap kiranya tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin...

Makassar, 28 November 2008

Penulis

ABSTRAKSI

Yerry Mamahit Padungge, E 131 04 019, dengan skripsi berjudul, "Suatu Analisis Tentang Peluang dan Tantangan Demokratisasi di Republik Rakyat Cina (RRC)", di bawah bimbingan **Patrice Lumumba**, selaku pembimbing I dan **S.M. Noor** selaku pembimbing II.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi oleh RRC untuk menjadi negara yang demokratis. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui peluang RRC untuk melakukan demokratisasi (2) mengetahui tantangan yang akan dihadapi oleh RRC dalam melakukan demokratisasi.

Sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif. Penulis mencoba untuk memberikan gambaran mengenai RRC. Dengan menggunakan data teoritis, yaitu data yang berasal dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan penulisan skripsi ini. Adapun alat analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan tidak mengesampingkan penyertaan data-data dalam bentuk angka-angka guna memperjelas substansi dari skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan gambaran bahwa ada peluang negara RRC untuk menjadi negara yang demokratis. Nilai-nilai yang harus dimiliki untuk melakukan demokratisasi politik telah dimiliki oleh RRC. Nilai-nilai tersebut antara lain, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat, dan menjamin tegaknya keadilan. Akan tetapi RRC masih membatasi diri pada demokratisasi dalam bidang ekonomi saja. Sedangkan pada bidang politik masih dianggap belum saatnya untuk dilakukan reformasi. Hal ini membuktikan bahwa ada peluang peluang RRC menjadi negara yang demokratis dan kapan saat yang dianggap tepat untuk melakukan demokratisasi dalam bidang politik akan ditentukan oleh Cina sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	14
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Konsep Ideologi.....	16
B. Konsep Demokratisasi.....	20
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC) DAN SISTEM EKONOMI-POLITIKNYA	
A. Sistem Politik dan Pemerintahan.....	28
B. Sistem Ekonomi.....	37
BAB IV TANTANGAN DAN PELUANG DEMOKRATISASI DI REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC)	
A. Tantangan Demokratisasi.....	52
B. Peluang Demokratisasi.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	
A. Kesimpulan.....	64

B. Saran-Saran.....	66
---------------------	----

DAFTAR KEPUSTAKAAN	67
---------------------------------	-----------



UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena bertahannya sistem politik berideologi komunisme di Republik Rakyat Cina (RRC) sampai sekarang mengindikasikan bahwa sampai saat ini sistem demokrasi tidak ada di RRC. Akan tetapi ideologi komunisme hanya diterapkan pada bidang politik saja, sedangkan pada bidang ekonomi pemerintah RRC telah mengadaptasikan ideologi kapitalisme ke dalam sistem ekonominya. Akibat adanya kemajuan dalam bidang ekonomi, keterlibatan RRC yang aktif dalam lembaga-lembaga internasional, mulai adanya kebebasan pers, serta interaksi hubungan yang tinggi antara masyarakat RRC dengan masyarakat internasional baik yang formal maupun yang tidak formal akan menuntut RRC untuk membuka informasi yang seluas-luasnya tentang negaranya.

Perubahan di RRC telah dimulai pada masa pemerintahan Deng Xiaoping kemudian diteruskan oleh Jiang Zemin dan Hu Jin Tao. Deng Xiao Ping memulai perubahan ini dengan melakukan transformasi politik dan pemikiran yang meliputi tindakan pengtahapan/selektif, proporsional, moderat, dan *Open Door Policy*. Jiang Zemin melanjutkan perubahan ini dengan melakukan amandemen konstitusi. Sedangkan Hu Jin Tao lebih berperan dalam menjaga keseimbangan agar perubahan yang dilakukan secara bertahap dalam bidang politik tidak berdampak negatif bagi kemajuan yang telah dicapai dalam bidang ekonomi.

Untuk meningkatkan perekonomian Cina yang terpuruk selama pemerintahan Mao Ze Dong, Deng Xiao Ping menggunakan kebijakan yang selektif artinya ia tidak melakukan perubahan di seluruh bidang tetapi hanya pada bidang-bidang tertentu saja yang dianggap mampu untuk meningkatkan kemakmuran rakyat Cina. Bidang pertanian yang menjadi perhatian pertama Deng karena sebagian besar masyarakat Cina bekerja pada bidang ini khususnya masyarakat pedesaan. Sedangkan pada daerah perkotaan, Deng lebih memusatkan perhatiannya pada bidang industri.

Pada tahap proposional, Deng menganalisis kebijakan-kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Apakah kebijakan yang diambil tersebut sebanding dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat Cina. Jika kebijakan yang diambil membawa manfaat bagi masyarakat Cina, kebijakan tersebut akan terus dilaksanakan dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat Cina.

Adapun pada tahap moderat, Deng bersifat pragmatis dan terbuka terhadap pengaruh dari luar. Deng menerima pengaruh budaya, sosial, hukum, dan teknologi dari luar. Pengaruh yang dianggap baik dan bermanfaat bagi Cina akan diterapkan dan disesuaikan dengan kebudayaan lokal bangsa Cina.

Keputusan Deng untuk menggunakan kebijakan *open-door policy* membuktikan adanya keinginan dari Deng untuk melakukan perubahan dan menjalin hubungan kerja sama dengan pihak luar.

Kebijakan *open-door policy* akan memainkan peran penting karena mengubah kebijakan pemerintahan RRC dari *centrally planned economy* menjadi *market-oriented economy*. Dengan sikap yang pragmatis Deng menyatakan bahwa

"it doesn't matter whether the cat is black or white as long as it catches mice"
(Tidak masalah kucing itu bewarna hitam atau putih selama kucing itu menangkap tikus).¹ Hal ini berarti bahwa pemerintah RRC dan PKC bersikap terbuka terhadap pengaruh dari luar. Tidak penting menganut sistem kapitalis atau sosialis, yang penting sistem itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cina. Menurut Deng, *"to get rich is glorious"* (menjadi kaya itu terhormat).² Bahkan ia menyatakan untuk membuat China menjadi lebih makmur, China harus dapat menggunakan *market economy* tanpa harus berubah menjadi negara kapitalis

Argumentasi tersebut diperkuat dengan klaim bahwa Partai Komunis China (PKC) berkuasa di RRC demi dan untuk mewakili kepentingan umum tersebut. Memang pada mulanya pemerintah RRC sempat akan memperkenalkan reformasi politik. Akan tetapi, yang disebut reformasi politik oleh Deng itu tidak lebih dari apa yang dikenal dengan istilah *dang-zheng fenkai* atau pembagian kerja antara PKC dan birokrasi. Maksud dari diktum itu adalah partai hanya berkuat dengan ideologi dan pendidikan kader pemimpin bangsa, sedangkan soal birokrasi dan pembangunan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah RRC. Langkah ini ditempuh ketika Deng melihat partai terlalu mencampuri urusan birokrasi sehingga menimbulkan kekacauan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Di lain pihak, keberhasilan Deng melaksanakan kebijakan modernisasi empat bidang, yaitu dalam bidang industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pertahanan nasional, telah membawa masyarakat Cina menuju

¹ *Harian Kompas*, edisi 12 Desember 2005, hal 55

² *Ibid*

kemakmuran ekonomi.³ Hal ini menimbulkan harapan bahwa Cina akan melangkah ke tahapan selanjutnya yaitu melakukan reformasi politik.

Pada bulan November 1987, Deng Xiao Ping dan Komite Sentral PKC yang masih membatasi reformasi pada bidang ekonomi menjawab tuntutan internasional yang menginginkan adanya reformasi politik di RRC dengan mengesahkan undang-undang (dalam percobaan) mengenai otonomi desa dan pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa.⁴ Selain itu, Deng mengatakan bahwa kalau sampai beradunya kepentingan umum (kolektif) dengan kepentingan pribadi, maka kepentingan umum harus diutamakan.

Akan tetapi, ketika terjadi demo besar di Lapangan Tiananmen, pada 4 Juni 1989, Deng mundur teratur dan kembali ke reformasi ekonomi.⁵ Sedangkan reformasi dalam bidang politik ditunda pelaksanaannya. Hal ini berarti bahwa negara hanya memberikan kebebasan terhadap individu untuk memperoleh keuntungan dalam bidang ekonomi saja. Tetapi hal yang dilarang adalah menentang pemerintah dan mempertanyakan hak PKC untuk berkuasa tanpa ada kekuatan politik lain sebagai penyeimbang menurut sistem *checks and balances*.

Pemerintah RRC juga tidak akan membiarkan adanya organisasi politik lain di luar birokrasi pemerintah dan negara. Misalnya, perindasan terhadap gerakan Falun Gong yang dipimpin oleh Li Hongzhi walaupun bukan organisasi politik memberikan indikasi atas prinsip tersebut. Kesalahan utama Falun Gong adalah mampu mengumpulkan massa dalam waktu singkat seperti yang

³ Rensius Nainggolan (Editor), *Isme-Isme Dewasa Ini*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta: 1994, hal. 101

⁴ L. Wibowo, *Belajar dari Cina*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta: 2004, hal 223

⁵ W. D. Sukisman, *Sejarah Cina Kontemporer Jilid II*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 1993, hal. 148

dilakukannya pada April 1999.⁶ Kemudian ada sebuah organisasi politik yang menamakan diri sebagai Partai Demokrasi Cina (*Zhongguo Minzhu Dang*). Ia mempropagandakan pentingnya hak-hak demokrasi rakyat RRC. Namun, pengaruh organisasi itu tidak efektif dan akhirnya menghilang karna adanya tekanan dan kontrol pemerintah yang ketat.

Kekuatan lain yang memperjuangkan demokratisasi dan perlindungan HAM adalah para mahasiswa. Namun, kebanyakan dari mereka kini sedang berada dalam pelarian di luar RRC sejak peristiwa Tiananmen sehingga makin menjauhkan mereka dari rakyat RRC sehingga peran dan gerakan mereka menjadi tidak efisien. Tekanan dari dalam negeri juga ada, tetapi karna adanya tekanan dan kontrol yang ketat dari Pemerintah RRC menyebabkan lemahnya keinginan dari masyarakat China untuk melakukan reformasi politik. Akan tetapi, akibat dari kemajuan ekonomi masyarakat RRC telah mengakibatkan terjadi krisis ideologi yaitu masyarakat China menggunakan ideologi Kapitalisme dalam bidang ekonomi karena kebebasan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya sehingga mengakibatkan terpinggirkannya ideologi Komunisme.

Reformasi dalam bidang politik kemudian mulai dilaksanakan oleh Jiang Zemin dengan melakukan amandemen konstitusi. Jiang memasukkan pemikiran "Tiga Perwakilan" ke dalam anggaran dasar partai. Teori "Tiga Perwakilan" ini menyebutkan bahwa komunis yang berkuasa di daratan Cina tidak hanya merupakan perwakilan dari kelas pekerja dan petani, tetapi juga massa luas

⁶ *Harian Kompas*, edisi Rabu 29 Maret 2006, hal 37

termasuk di dalamnya kelompok kapitalis/pengusaha. Jiang menginginkan adanya cara berpikir baru dalam melihat berbagai perkembangan masyarakat Cina.⁷

Akan tetapi PKC tidak ingin melakukan reformasi politik secara revolusioner. PKC ingin reformasi politik dilaksanakan secara evolusi, bertahap dan tidak mengganggu kemajuan yang telah dicapai dalam bidang ekonomi. Hu Jin Tao beranggapan bahwa reformasi dalam bidang politik harus dilaksanakan secara harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa Hu tidak menginginkan kemajuan yang telah tercapai dalam bidang ekonomi akan memiliki dampak terhadap bidang lain dan pada akhirnya akan berdampak pada bidang politik juga. Masalah-masalah yang dihadapi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh pemerintah RRC dan PKC. Jika pemerintah RRC dan PKC membiarkan masalah ini akan mengakibatkan munculnya kemarahan rakyat Cina karena terus ditekan oleh pemerintah RRC dan PKC sehingga hal ini, pada akhirnya, akan mendorong rakyat China untuk menekan balik pemerintah RRC dan PKC untuk mengadakan reformasi juga di bidang politik.

Maka berdasarkan pemaparan tersebut, ada peluang terjadinya demokratisasi di RRC tetapi ada juga tantangan yang menghambat proses tersebut. Proses ini tidak dapat terjadi melalui suatu revolusi tetapi harus melalui suatu proses evolusi. Maka berdasarkan kondisi yang terjadi di RRC saat ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

“ Suatu Analisis Tentang Peluang dan Tantangan Demokratisasi di Republik Rakyat China (RRC). ”

⁷ Harian Kompas, edisi 24 Desember 2003, hal 55

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Demokratisasi di Republik Rakyat Cina (RRC), tidak dapat dilakukan melalui suatu revolusi atau tekanan keras dari komunitas internasional, diperlukan kesadaran para petinggi PKC untuk mau mengganti atau menyesuaikan ideologi negara karena sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan negara RRC serta situasi domestik dan internasional. Tingkat perekonomian RRC yang tinggi dan telah memberikan kemakmuran bagi sebagian masyarakatnya telah memberikan mereka akses kepada demokrasi, walaupun hal itu masih terbatas pada bidang ekonomi akan tetap menjaga peluang negara tersebut untuk melangsungkan demokrasi.⁸ Modernisasi dan kesejahteraan secara ekonomi akan selalu disertai dengan sejumlah faktor yang kondusif bagi demokrasi. Meningkatnya tingkat melek huruf dan tingkat pendidikan, urbanisasi, dan pembangunan media massa akan menyadarkan masyarakat Cina akan arti penting demokrasi. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana peluang RRC untuk melakukan demokratisasi?
2. Apa tantangan yang akan dihadapi oleh RRC dalam melakukan demokratisasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁸ Seymour Martin Lipset, *Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy*, *American Political Science Review* 53: 1959, hal 75

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peluang-peluang yang dimiliki oleh RRC untuk melakukan demokratisasi.
2. Mengetahui tantangan yang akan dihadapi oleh RRC dalam melakukan demokratisasi.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pengembangan studi Hubungan Internasional di masa mendatang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian bagi yang tertarik dengan masalah demokrasi di RRC.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan kajian bagi semua pihak yang tertarik dengan masalah demokrasi di RRC.

D. Kerangka Konseptual

Dalam menganalisis tentang peluang dan tantangan demokratisasi di Republik Rakyat China (RRC), penulis memakai konsep ideologi dan konsep demokratisasi. Konsep ideologi digunakan untuk dapat memahami nilai-nilai/sistem politik yang berlaku di RRC. Sedangkan konsep demokratisasi digunakan untuk menjelaskan nilai-nilai apa yang dibutuhkan untuk menganut sistem demokrasi dan elemen-elemen yang terkandung didalam sistem demokrasi. Hal ini dimaksudkan supaya muncul pemahaman mengenai nilai-nilai apa saja yang dibutuhkan RRC untuk menjadi negara yang demokratis. Sehingga muncul

pemahaman terhadap peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Cina dalam melaksanakan sistem demokrasi.

Pengertian ideologi menurut *The Oxford guide to the English language* adalah rancangan yang tersusun didalam pikiran atau gagasan atau cita-cita yang membentuk dasar bangunan misalnya dalam teori politik atau ekonomi atau sosial. Atau dengan kata lain pengertian ideologi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.

Dalam bahasa Indonesia, ideologi sering disebut sebagai "dasar negara" atau "falsafah negara". Karena memberikan pengesahan kepada pemerintah, ideologi membenarkan adanya status quo. Tetapi ideologi juga bisa digunakan oleh pihak lainnya (pihak pemberontak, pihak oposisi atau pihak reformasi) untuk menyalahkan pemerintah, menyerang kebijakan pemerintah sampai kepada mengubah status quo. Sekalipun pemerintah bisa menindas warga negaranya dengan menggunakan dalih "hak ketuhanan raja" atau "kehendak sejarah", tetapi pihak lainnya bisa membenarkan tindakan kekerasan mereka dengan bersandar pada prinsip "hak-hak dasar" atau "kehendak yang kuasa".

Menurut **Richard H. Cox**, sistem ideologi yang dianut oleh bangsa China tergolong ideologi yang doktiner yaitu ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi itu dirumuskan secara sistematis dan terinci dengan jelas, diindoktrinasikan kepada warga masyarakat, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintah. Biasanya sistem nilai atau ideologi

yang diperkenankan hidup dalam masyarakat seperti ini adalah ideologi yang doktriner tersebut.

Akan tetapi, apabila ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi tersebut tidak dirumuskan secara sistematis dan terinci, melainkan dirumuskan secara umum (prinsip-prinsipnya saja) maka ideologi tersebut digolongkan sebagai ideologi pragmatis. Dalam hal ini, ideologi itu tidak diindoktrinasikan, tetapi disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, sistem ekonomi, kehidupan agama dan sistem politik. Atas dasar itu, pelaksanaannya tidak diawasi oleh aparat partai atau pemerintah, melainkan dengan pengaturan kelembagaan. Maksudnya, siapa saja yang tidak menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersebut tidak akan hidup secara wajar. Liberalisme merupakan salah satu contoh ideologi pragmatis.

Sedangkan menurut **B. N. Marbun, SH**, ideologi merupakan suatu konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup; prinsip-prinsip atau nilai yang mengarahkan secara sah tingkah laku masyarakat dan lembaga-lembaga politik.

Menurut **Lenin**, dalam ideologi komunisme ada demokrasi yang sesuai bagi negara komunis yaitu demokrasi proletar yang sudah merupakan perbaikan terhadap demokrasi borjuasi yang menurut Lenin merupakan demokrasi untuk minoritas terhadap mayoritas yang tidak mempunyai hak demokratis. Menurut Lenin, demokrasi bersifat:

Demokrasi untuk mayoritas dari rakyat dan penindasan dengan kekerasan terhadap kaum pengisap dan penindas, dengan jalan menyingkirkan mereka dari demokrasi. (Budiardjo 2008, 153)

Komunisme tidak hanya merupakan sistem politik tetapi juga mencerminkan suatu gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu:

1. Gagasan monoisme (sebagai lawan dari pluralisme). Gagasan ini menolak adanya golongan-golongan di dalam masyarakat sebab dianggap golongan yang berlainan aliran ini merupakan bentuk perpecahan. Akibat dari gagasan ini ialah bahwa persatuan dipaksakan dan oposisi ditindas.
2. Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah dan harus dipakai untuk mencapai komunisme. Paksaan ini dipakai dalam dua tahap: pertama, terhadap musuh, kedua terhadap pengikutnya sendiri yang dianggap masih kurang insaf.
3. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme. Karena itu semua alat kenegaraan seperti polisi, tentara, kejaksaan dipakai untuk diabdikan kepada tercapainya komunisme (sering disebut sistem mobilisasi atau *mobilization system*, sebagai lawan dari sistem perdamaian atau *conciliation system*). Ini mengakibatkan suatu campur tangan negara yang sangat luas dan mendalam di bidang politik, sosial, dan budaya. Di bidang hukum hal ini berarti bahwa hukum tidak dipandang sebagai *a good in it self* tetapi dianggap sebagai alat revolusi untuk mencapai masyarakat komunisme (Budiardjo 2008, 155)

Sedangkan di RRC, gagasan demokrasi berbentuk demokrasi rakyat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran **Mao Tse Tung** yang melancarkan gagasan mengenai Demokrasi Baru (*New Democracy*) melalui buku-bukunya yang menjadi buku pedoman bagi rakyat Cina seperti yang berjudul *The Thoughts of*

Mao Tse Tung dan Little Red Book. Beliau mengemukakan cita-citanya mengenai interaksi yang erat dan berkesinambungan antara pemimpin dan massa dalam doktrinya, yaitu "garis massa", dimana dikatakan bahwa dalam semua usaha dan kegiatan bangsa Cina, kepemimpinan yang sejati harus muncul dari dan untuk rakyat.

Meskipun beliau melakukan berbagai penyesuaian dan modifikasi terhadap Marxisme-Leninisme, beliau tetap seorang leininis yang ortodoks, setidak-tidaknya dalam dua segi yaitu penekanannya pada peranan partai komunis dan pengutamaan kediktatoran proletariat. Bagi beliau, partai merupakan organisasi utama yang dominan, pertama-tama untuk melaksanakan revolusi dan kemudian dalam menjalankan pemerintahan negara. Beliau menyatakan:

Kalau mau mengadakan revolusi, maka harus ada sebuah partai yang revolusioner. Tanpa partai yang revolusioner, tanpa partai yang dibentuk atas dasar teori dan gaya revolusioner dari Marx, Lenin, dan Stalin, tidak mungkin kelas buruh dan maasa rakyat dapat diarahkan untuk mengalahkan imperialisme dan anjing-anjingnya.. Partai komunis Cina adalah partai yang dibentuk dan dikembangkan menurut model Partai Komunis Uni Sovyet.

Beliau memimpin pelembagaan sistem totaliter yang sangat menonjol. Tujuannya tidak hanya untuk menekan oposisi tetapi juga untuk mengindoktrinasi semua penduduk sehingga mereka dapat mengikuti cara-cara berpikir dan bertindak seperti yang telah beliau tentukan. Menurut **Georg Sorensen** untuk membentuk pemerintahan yang demokratis (demokratisasi) diperlukan tiga tahapan, yaitu tahapan pertama yang meliputi pergantian rezim non-demokratis. Pada tahap kedua, pembangunan nilai-nilai tertib demokrasi. Dan tahap ketiga

adalah tahap konsolidasi terhadap tahapan sebelumnya agar menjadi budaya politik negara tersebut.⁹ **Henry B. Mayo** dalam bukunya *Introduction to Democratic Theory* memberikan nilai-nilai yang harus dimiliki untuk melakukan demokratisasi politik adalah:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat
6. Menjamin tegaknya keadilan¹⁰

Walaupun pemerintah RRC dalam bidang politik menganut sistem ideologi komunisme, tetapi dalam bidang ekonomi pemerintah RRC menganut sistem ideologi yang kapitalis, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, dapat menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, mampu menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, dapat membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat, dan mampu menjamin tegaknya keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ideologi komunisme model Cina menerima konsep tentang

⁹ Georg Sorensen, *Democracy and Democratization: Processes and Prospecting in a Changing World*, Westview Press: 1993, hal. 275

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2008, hal. 119

demokrasi dan adanya keterbukaan pemerintah RRC akan memiliki dampak pada bidang politik. Sistem demokrasi yang akan dianut oleh RRC tidak akan sama seperti sistem demokrasi yang dianut oleh negara Barat, tetapi akan memunculkan perpaduan yang baru. Hal inilah yang kemudian akan disebut sistem demokrasi model RRC.

E. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dari beberapa rumusan yang diambil oleh penulis, maka penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian deskriptif ini, penulis mencoba memberikan gambaran mengenai peluang dan tantangan pembangunan demokratisasi politik di RRC dan perkembangannya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan situs-situs internet maupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

Adapun tempat-tempat yang dikunjungi selama pengumpulan data, antara lain:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Makassar
2. Perpustakaan Fisip UNHAS, Makassar

3. Perpustakaan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UNHAS,
Makassar
4. Perpustakaan Freedom Institute, Jakarta
5. Perpustakaan Umum Abdurrasyid Dg Lurang, Sungguminasa-Gowa

3. Jenis Data

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan data sekunder dari berbagai literatur terkait. Adapun data sekunder yang dibutuhkan adalah data mengenai peluang dan tantangan pembangunan demokratisasi politik di RRC.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta lainnya untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Dan berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran tentang pembangunan demokratisasi politik di RRC.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Konsep Ideologi

Untuk menganalisis tentang peluang dan tantangan demokratisasi di RRC, penulis menggunakan konsep ideologi dan konsep demokratisasi. Secara umum konsep ideologi diartikan sebagai kumpulan ide-ide. Kumpulan ide-ide ini akan memberikan arah dan tujuan bagi negara yang menganutnya. Pemahaman yang baik terhadap konsep ideologi akan memberikan gambaran yang jelas terhadap nilai-nilai/sistem politik yang berlaku di negara tersebut.

Pengertian ideologi adalah rancangan yang tersusun didalam pikiran atau gagasan atau cita-cita yang membentuk dasar bangunan misalnya dalam teori politik atau ekonomi atau sosial kalau mengikuti apa yang tertuang dalam The Oxford guide to the English language. Atau dengan kata lain pengertian ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup (yang tertuang dalam kamus besar bahasa Indonesia).

Dalam bahasa Indonesia, ideologi sering disebut sebagai "dasar negara" atau "falsafah negara". Karena memberikan pengesahan kepada pemerintah, ideologi membenarkan adanya status quo. Tetapi ideologi juga bisa digunakan oleh pihak lainnya (pihak pemberontak, pihak oposisi atau pihak reformasi) untuk menyalahkan pemerintah, menyerang kebijakan pemerintah sampai kepada mengubah status quo. Sekalipun pemerintah bisa menindas warga negaranya

dengan menggunakan dalih "hak ketuhanan raja" atau "kehendak sejarah", tetapi pihak lainnya bisa membenarkan tindakan kekerasan mereka dengan bersandar pada prinsip "hak-hak dasar" atau "kehendak yang kuasa".

Ideologi yang dianggap sarat dengan kepentingan kelas pekerja bukan tidak bisa digunakan untuk menentang kekuasaan negara borjuis, selain juga untuk mensahkan kekuasaan diktator terhadap kelas pekerja. Pengertian lain mengenai konsep ideologi adalah:

- Sekumpulan Doktrin, mitos, kepercayaan, dan lain-lain, yang menuntut individu, gerakan sosial, institusi, golongan, atau kelompok yang besar.
- Sekumpulan doktrin, mitos, dan lain-lain, yang mengacu pada beberapa tujuan politik dan sosial, seperti fasisme, bersama dengan perangkat-perangkat yang mendukung pemakaiannya.
- eorisasi dari esensi yang visioner dan tidak praktis.

(Random House Unabridged Dictionary)

- Sekumpulan ide yang merefleksikan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi sosial dari individu, kelompok, golongan, atau budaya.
- Sekumpulan doktrin atau kepercayaan yang membentuk dasar-dasar politik, ekonomi, dan sistem-sistem lain.

(The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition)

- sebuah onentasi yang menjadi karakteristik dari pemikiran sebuah kelompok atau negara.

(WordNet® 3.0, © 2006 by Princeton University)

- sebuah sistem kepercayaan atau teori yang biasanya bersifat politis, yang dipegang oleh seseorang atau kelompok kapitalisme, komunisme, dan sosialisme biasanya disebut sebagai ideologi.

(The American Heritage® New Dictionary of Cultural literacy, Third Edition)

- sekumpulan ide yang merefleksikan kebutuhan sosial dan aspirasi seseorang, kelompok, golongan, maupun kebudayaan.

(The American Heritage® Stedman's Medical Dictionary)

- sekumpulan yang sistematis khususnya mengenai kehidupan atau kebudayaan manusia.
- Sebuah sikap ataupun kandungan dari karakteristik pemikiran seseorang, group, maupun kebudayaan.

(Merriam-Webster's Medical Dictionary, © 2002 Merriam-Webster, Inc.)

Maka dengan mengambil poin-poin atau butiran-butiran yang ada dan terkandung didalam istilah ideologi itu, maka dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk konsep bersistem yang menjadi dasar atau asas teori yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup manusia.

Inti utama dari ideologi adalah hasil pemikiran manusia. Ideologi suatu negara muncul berdasarkan keyakinan yang dipakai sebagai dasar pemerintahan negara. Dimana sistem negara merupakan bentuk dasar kehidupan politik. Ideologi merupakan suatu kerangka pemikiran historis yang melatarbelakangi terbentuknya karakter suatu negara.

Menurut **B. N. Marbun, SH**, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang asas pendapatnya memberikan arah tujuan untuk kelangsungan hidup; prinsip-prinsip atau nilai yang mengarahkan secara sah tingkah laku masyarakat dan lembaga-lembaga politik.¹¹ Menurut **Richard H. Cox**, sistem ideologi akan bersifat doktriner apabila ajaran-ajaran yang terkandung didalamnya dirumuskan secara sistematis dan terinci dengan jelas, diindoktrinasikan kepada warga masyarakat, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintah.¹² Biasanya sistem nilai atau ideologi yang diperkenankan hidup dalam masyarakat seperti ini adalah ideologi yang doktriner tersebut.

Akan tetapi, apabila ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi tersebut tidak dirumuskan secara sistematis dan terinci, melainkan dirumuskan secara umum (prinsip-prinsipnya saja) maka ideologi tersebut digolongkan sebagai ideologi pragmatis. Dalam hal ini, ideologi itu tidak diindoktrinasikan, tetapi disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, sistem ekonomi, kehidupan agama dan sistem politik. Atas dasar itu, pelaksanaannya tidak diawasi oleh aparat partai atau pemerintah, melainkan dengan pengaturan kelembagaan. Maksudnya, siapa saja yang tidak menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tidak akan hidup secara wajar. Liberalisme merupakan salah satu contoh ideologi pragmatis. Oleh karena itu sistem nilai atau ideologi yang ada dalam negara Cina tergolong ideologi yang doktriner.

¹¹ B. N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1996, hlm. 212

¹² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, Jakarta: 2007, hlm. 33

Sedangkan konsep ideologi menurut A.S. Hornby, dapat didefinisikan secara sederhana sebagai:

Seperangkat gagasan-gagasan dan ide yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dikuasai oleh seseorang atau kelompok tertentu adalah sesuatu yang sangat penting dan benar-benar vital bagi kelangsungan hidup sebuah bangsa, karena ideologi memberi kejelasan identitas nasional, kebanggaan dan kekuatan yang bisa mengilhami untuk mencapai cita-cita sosial dan politik.¹³

Tujuan ideologi adalah untuk membangkitkan perasaan dan mendorong munculnya tindakan, kekuatan ideologi terletak pada kapasitasnya dalam menangkap dan menggerakkan imajinasi manusia serta melepaskan energi-energi manusia menjadi tindakan.¹⁴ Jadi dalam politik, ideologi dapat menjadi penggerak dinamis yang utama dalam kehidupan organisasi atau lembaga politik serta dalam kehidupan politik suatu negara atau bangsa. Ideologi pun dapat dijadikan sebagai alat untuk membenarkan tindakan politik. Karena ideologi berfungsi menyatukan rakyat dalam organisasi politik sehingga upaya untuk melakukan tindakan politik menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini membuktikan bahwa ideologi komunisme sering dijadikan alat untuk membenarkan tindakan politik yang diambil oleh pemerintah RRC dan PKC.

B. Konsep Demokratisasi

Secara sederhana demokratisasi dapat diartikan sebagai suatu transformasi atau proses untuk mencapai suatu sistem yang liberal. Sedangkan makna dan

¹³ A. S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary* Edisi ke-4, Oxford University Press, Oxford: 1989, hlm. 616

¹⁴ Leo M. Christenson, *Ideologies and Modern Politics*, Dodd, Mead & Company, New York: 1975, hlm. 6

substansi kata demokrasi itu sendiri berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam arti yang lebih luas demokrasi sering dimaknai sebagai pemerintahan dengan segenap kegiatan yang dilaksanakan dengan rakyat sebagai subyek dan titik tumpu roda penentu berjalannya kepolitikan dan pemerintahan.¹⁵

Menurut **Lenin**, dalam ideologi komunisme ada demokrasi yang sesuai bagi negara komunis yaitu demokrasi proletar yang sudah merupakan perbaikan terhadap demokrasi borjuasi yang menurutnya merupakan demokrasi untuk minoritas terhadap mayoritas yang tidak mempunyai hak demokratis. Menurut **Lenin**, demokrasi yang sesuai dengan ideologi komunisme harus bersifat:

Demokrasi untuk mayoritas dari rakyat dan penindasan dengan kekerasan terhadap kaum pengisap dan penindas, dengan jalan menyingkirkan mereka dari demokrasi (Budiardjo 2008, 153).

Terhadap kecaman bahwa diktator dan demokrasi pada hakikatnya bertentangan satu sama lain, **Lenin** menandakan bahwa demokrasi dan diktator merupakan dua muka dari lencana yang sama (*two sides of one medal*).¹⁶ Komunisme tidak hanya merupakan sistem politik tetapi juga mencerminkan suatu gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai tersebut, yaitu:

1. Gagasan monoisme (sebagai lawan dari pluralisme). Gagasan ini menolak adanya golongan-golongan di dalam masyarakat sebab dianggap bahwa golongan yang berlainan aliran ini merupakan bentuk perpecahan. Akibat

¹⁵ Dikutip dari <http://usinfo.state.gov/products/pubs/whatsdem/whatdm2.htm> diakses pada tanggal 19 Agustus 2008 pukul 23.30

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2008, hal. 154

dari gagasan ini ialah bahwa persatuan dipaksakan dan oposisi ditindas. Untuk mengerahkan semua tenaga dan potensi ke arah terbentuknya komunisme, Partai Komunis ditetapkan sebagai organisasi yang pokok. Partai komunis tidak hanya memimpin massa yang tergabung di dalam partainya, tetapi juga memimpin lembaga-lembaga kenegaraan seperti mengenai personalianya maupun dalam menentukan kebijakan politik. Sekalipun badan-badan perwakilan mempunyai banyak anggota yang secara formal tidak terikat pada partai, tetapi bimbingan dan pengendalian diselenggarakan melalui anggota-anggota Partai Komunis dalam lembaga itu. Lagi pula orang non-partai hanya dapat dicalonkan kalau mendapat persetujuan dari Partai Komunis.

2. Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah dan harus dipakai untuk mencapai komunisme. Paksaan ini dipakai dalam dua tahap: pertama, terhadap musuh, dan kedua terhadap pengikutnya sendiri yang dianggap masih kurang loyalitasnya terhadap partai.
3. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme. Karena itu semua alat kenegaraan seperti polisi, tentara, dan kejaksaan dipakai untuk diabdikan kepada tercapainya komunisme (sering disebut sistem mobilisasi atau *mobilization system*, sebagai lawan dari sistem perdamaian atau *conciliation system*). Ini mengakibatkan suatu campur tangan negara yang sangat luas dan mendalam di bidang politik, sosial, dan budaya. Di bidang hukum hal ini berarti bahwa hukum tidak

dipandang sebagai *a good in it self* tetapi dianggap sebagai alat revolusi untuk mencapai masyarakat komunisme¹⁷

Ciri-ciri demokrasi proletar berbentuk dua, yaitu: a) Suatu wadah front persatuan (*unified front*) yang merupakan landasan kerja sama dengan partai komunis sebagai pusatnya; b) Penggunaan beberapa lembaga pemerintahan. Di RRC, gagasan demokrasi proletar dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Mao Tse Tung yang melancarkan gagasan mengenai Demokrasi Baru (*New Democracy*) melalui buku-bukunya yang menjadi buku pedoman bagi rakyat Cina seperti yang berjudul *The Thoughts of Mao Tse Tung* dan *Little Red Book*. Front persatuan diakuinya sebagai wadah kerja sama dengan Partai Komunis China sebagai pusatnya. Beliau mengemukakan cita-citanya mengenai interaksi yang erat dan berkesinambungan antara pemimpin dan massa dalam doktrinya, yaitu "garis massa", dimana dikatakan bahwa dalam semua usaha dan kegiatan bangsa Cina, kepemimpinan yang sejati harus muncul dari dan untuk rakyat.

Meskipun beliau melakukan berbagai penyesuaian dan modifikasi terhadap Marxisme-Leninisme, beliau tetap seorang leininis yang ortodoks, setidak-tidaknya dalam dua segi yaitu penekanannya pada peranan partai komunis dan pengutamaan kediktatoran proletariat. Bagi beliau, partai merupakan organisasi utama yang dominan, pertama-tama untuk melaksanakan revolusi dan kemudian dalam menjalankan pemerintahan negara. Beliau menyatakan:

Kalau mau mengadakan revolusi, maka harus ada sebuah partai yang revolusioner. Tanpa partai yang revolusioner, tanpa partai yang dibentuk atas dasar teori dan gaya revolusioner dari Marx, Lenin, dan Stalin, tidak

¹⁷ Ibid, hlm. 155

mungkin kelas buruh dan massa rakyat dapat diarahkan untuk mengalahkan imperialisme dan anjing-anjingnya.. Partai komunis Cina adalah partai yang dibentuk dan dikembangkan menurut model Partai Komunis Uni Sovyet.¹⁸

Gagasan **Deng Xiaoping** dengan empat modernisasinya, modernisasi pertanian, industri, pertahanan serta iptek, membawa kemajuan bagi RRC dalam bidang ekonomi dan peningkatan taraf hidup sebagian besar warganya. Hal ini digunakan sebagai pembenaran bahwa PKC telah berhasil memimpin Cina menjadi negara yang makmur. Hal ini juga dijadikan alasan bagi Partai Komunis China untuk bisa tetap bertahan dan mendapat legitimasi dari masyarakatnya.¹⁹ Menurut **Arief Budiman**, faktor-faktor utama yang diperlukan untuk membentuk sebuah pemerintahan yang demokratis, yaitu: faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor budaya.²⁰ Sedangkan menurut **Milton Friedman**, kebebasan politik berhubungan erat dengan kebebasan ekonomi. Demokrasi adalah hasil dari perkembangan pasar bebas yang dijalankan oleh sistem kapitalis. Sistem politik yang demokratis akan muncul dengan sendirinya jika lembaga-lembaga ekonomi yang kapitalis banyak terdapat di RRC. **Friedman** berpendapat:

Bentuk organisasi ekonomi yang memberikan kebebasan ekonomi secara langsung, yakni kapitalisme kompetitif, juga mengembangkan kebebasan politik, karena dia memisahkan kekuasaan ekonomi dari kekuasaan politik dan dengan cara ini kekuatan yang baru akan mengimbangi kekuatan yang lama.²¹

¹⁸ William Ebenstein dan Edwin Fogelman, *Today's Issues*, Edisi ke-9, Prentice-Hall, Inc., Inggris: 1985, hal. 92

¹⁹ Miriam Budiardjo, *loc cit.*

²⁰ Arief Budiman, *Teori Negara*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1996, hal. 40

²¹ *Ibid*

Sedangkan menurut **Holloway** dan **Picciotto**, munculnya sistem pemerintahan yang demokratis harus didukung oleh kemajuan dalam bidang ekonomi. Kemajuan dalam bidang ekonomi akan memberikan dampak bagi sistem politik suatu negara. Sedangkan menurut **Seymour Martin Lipset**, tingkat perekonomian RRC yang tinggi dan telah memberikan kemakmuran bagi sebagian masyarakatnya telah memberikan mereka akses kepada demokrasi, walaupun hal itu masih terbatas pada bidang ekonomi akan membuat semakin besar peluang negara tersebut untuk melangsungkan demokrasi.²² Modernisasi dan kesejahteraan secara ekonomi akan selalu disertai dengan sejumlah faktor yang kondusif bagi demokrasi. Meningkatnya tingkat melek huruf dan tingkat pendidikan, urbanisasi, dan pembangunan media massa akan menyadarkan masyarakat Cina akan arti penting demokrasi.

Therborn menyatakan, adanya mobilisasi rakyat, yaitu kekuatan kelas menengah di pedesaan berkombinasi dengan kekuatan kelas buruh yang ada di perkotaan, serta adanya perpecahan dalam kelompok kelas penguasa, merupakan faktor-faktor sosial yang akan membentuk sebuah kombinasi dan interaksi dari kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam sebuah masyarakat, dan yang berpengaruh bagi terbentuk sistem pemerintahan yang baru akan mempengaruhi timbulnya sebuah sistem pemerintahan yang demokratis.²³ Adanya tekanan dari kelompok-kelompok tersebut akan memaksa pemerintah yang totaliter mengubah sistem politiknya.

²² Seymour Martin Lipset, *Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy*, *American Political Science Review* 53: 1959, hal 75.

²³ Arief Budiman, *op cit.*, hal. 48

Faktor-faktor budaya merupakan semua faktor yang ada hubungannya dengan ide-ide atau nilai-nilai yang dihayati oleh seseorang atau sebuah masyarakat dalam alam pikirannya. Nilai atau ide yang mempengaruhi tingkah laku masyarakat ini bisa merupakan nilai-nilai atau ide-ide yang datang dari masa lalu berupa tradisi atau kebiasaan yang sudah ada dalam sebuah masyarakat, bisa juga merupakan nilai atau ide yang baru diciptakan sekarang. Yang pertama disebut nilai budaya sedangkan yang kedua disebut ideologi. Peluang terjadinya perubahan sistem pemerintahan melalui faktor budaya akan berlangsung secara bertahap (evolusi). Tetapi, pada saat ini, ketika teknologi berkembang begitu pesatnya, perubahan kebudayaan juga akan berlangsung dengan pesatnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan sistem pemerintahan dari totaliter ke bentuk sistem pemerintahan demokratis memiliki tiga faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor budaya. Menurut penulis, ketiga faktor ini tidak dapat dipisahkan melainkan harus dilihat sebagai kesatuan yang saling melengkapi dalam sebuah proses demokratisasi. Republik Rakyat China (RRC) merupakan negara yang berkembang sangat pesat dalam berbagai bidang selama dua dasawarsa terakhir. Hal ini membuktikan bahwa ada peluang bagi RRC untuk menjadi negara yang demokratis. Tetapi ada juga tantangan yang harus dihadapi oleh RRC selama proses menuju negara yang demokratis. Proses ini akan berlangsung secara bertahap (evolusi) dan akan ditentukan sendiri oleh RRC.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG REPUBLIK RAKYAT CINA DAN SISTEM POLITIK-EKONOMINYA

Republik Rakyat Cina (RRC) merupakan negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) dalam jumlah yang besar. RRC yang memiliki luas wilayah 9.596.960 km², secara geografis, menunjukkan bahwa RRC merupakan negara terbesar di Asia dan terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Kanada. RRC juga memiliki 2 wilayah otonomi khusus, yakni Makau dan Hongkong. RRC juga adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yaitu 1,321,851,888 jiwa.²⁴ Dari segi etnis, di Cina terdapat 56 etnis dan mayoritas di antaranya adalah etnis Han yang mencapai sekitar 93% dari seluruh penduduk Cina.²⁵ Jumlah tersebut memberikan keuntungan positif dan negatif bagi RRC. Jumlah penduduk yang besar menjadikan RRC sebagai negara dengan potensi pasar ekonomi yang besar, jumlah tenaga kerja yang besar, dan jumlah anggota militer yang besar. Tetapi di lain sisi, pemerintah RRC dituntut untuk mampu mengatasi ancaman bahaya kelaparan dan masalah pengangguran karena besarnya jumlah populasi tersebut.

Besarnya jumlah SDA dan SDM yang dimiliki oleh RRC menunjukkan bahwa RRC memiliki segala prasyarat yang diperlukan untuk menjadi negara maju. Akan tetapi, kemajuan ini memiliki dampak positif dan negatif. Kemajuan yang pesat dalam bidang ekonomi telah mendesak RRC untuk menata ulang

²⁴ Dikutip dari <http://news.cia.gov/china>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2008, pukul 17.00

²⁵ Ibid

sistem-sistem yang telah ada sebelumnya. Sedangkan pada sisi lain, kemajuan ekonomi telah membawa kemakmuran bagi sebagian masyarakatnya. Perlunya kemampuan untuk beradaptasi dengan kemajuan yang dicapai akan menentukan masa depan RRC. Sistem komunis yang telah ada sejak masa Mao Zedong tidak sama lagi dengan sistem komunis pada masa pemerintahan Hu Jin Tao. Hal ini menunjukkan bahwa telah ada perubahan dalam sistem komunis. Perubahan itu telah berlangsung setahap demi tahap (evolusi) dan perubahan itu ditentukan oleh Cina sendiri.

A. Sistem Politik dan Pemerintahan

Sistem politik di Cina merupakan produk dari masa revolusi yang panjang yang berlangsung dari tahun 1911 sampai tahun 1949 dan meliputi tiga perombakan sistem politik secara revolusi.²⁶ Revolusi pertama pada tahun 1911 yang mengganti sistem kerajaan yang telah bertahan selama berabad-abad. Revolusi kedua pada tahun 1928 dengan dibentuknya pemerintah pusat yang baru di bawah kekuasaan Kuomintang (KMT) yang menggantikan sistem pemerintahan *warlord (panglima perang)* yang terpecah-belah selama masa permulaan republik Cina dengan sistem dominasi satu partai yang lebih terorganisir dan terpusat. Revolusi ketiga terjadi pada tahun 1949 menjadikan Partai Komunis Cina (PKC) sebagai penguasa dan membentuk sistem komunis di Cina.²⁷

Situasi politik Cina sangat tidak stabil pada awal abad ke-20. Hal ini ditandai kekacauan internal selama masa kekaisaran yang penuh dengan

²⁶ W. D. Sukisman, *Sejarah Cina Kontemporer Jilid 1*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 1992, hal. 121

²⁷ Ibid

pemberontakan. Lalu usaha yang dilakukan oleh Dr. Sun Yat Sen untuk mengganti sistem Kekaisaran Cina menjadi negara republik dengan menggulingkan Dinasti Qing pada tahun 1912.²⁸ Perang saudara antara Republik Nasionalis Cina dibawah pimpinan Chiang Kai Shek dengan Partai Komunis Cina (PKC) yang dipimpin oleh Mao Ze Dong akhirnya dimenangkan oleh Partai Komunis. Mao Zedong selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Cina lalu memproklamirkan berdirinya negara Republik Rakyat Cina (RRC) pada tanggal 1 Oktober 1949.²⁹

PKC mengambil model dari Partai Komunis Uni Sovyet. Pengaruh model ini begitu kuat dalam organisasi PKC dan dalam konsepnya tentang peranan partai politik dalam sistem politik Cina. PKC berkuasa di Cina sejak tahun 1949 dengan suatu keyakinan bahwa mobilisasi dan perjuangan adalah inti dari politik. Sifat-sifat seperti militer, antusiasme, kepahlawanan, pengorbanan, dan usaha bersama untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Bagi elite PKC, politik bukan merupakan persoalan kompetisi politik secara damai atau pengelolaan sumber-sumber daya materi, tetapi merupakan usaha untuk memobilisasikan dan menggiatkan sumber-sumber daya manusia dalam keadaan yang kritis. Hal ini berhubungan erat dengan konsep *mass line* (garis massa) dalam kepartaian. Prinsip pokok PKC ini berasal dari keadaan yang dihadapi ketika berjuang merebut kekuasaan. Dalam satu dimensi, konsep ini merupakan suatu pengakuan akan kenyataan bahwa suatu gerakan tidak bisa didukung oleh anggota-anggota partai saja, tetapi tergantung pula pada dukungan, intelegensi, penyediaan pangan,

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

calon-calon anggota baru, dan ketrampilan administratif yang bisa disumbangkan oleh masyarakat bukan anggota partai. Dalam dimensi kedua, garis massa itu mempunyai fungsi pengendalian atas tingkah-laku kaum birokrat dan intelektual. Dengan menegaskan bahwa para pejabat harus berinteraksi dengan massa, PKC bertujuan meniadakan penyelewengan-penyelewengan dan menciptakan jenis birokrat baru; dengan mempercayakan tugas-tugas administratif kepada kelompok-kelompok rakyat, maka diharapkan bisa mengurangi atau melemahkan struktur birokrasi. Yang terakhir, garis massa dengan anjuran-anjuran "makan, hidup, bekerja, dan berkonsultasi dengan massa", adalah ungkapan dari rasa senasib dengan rakyat dan keterikatan terhadap kesejahteraan rakyat.³⁰ Garis massa, yang dikembangkan selama periode Soviet itu, mengarahkan perjuangan yang berorientasi pada petani, karena golongan Komunis Cina tidak dapat berbicara tentang dukungan atau kewajiban rakyat tanpa berbicara tentang golongan petani.

Gagasan tentang "percaya pada diri sendiri" merupakan unsur lain dalam gaya politik PKC yang selama ini berhasil menciptakan kekuatan besar. Kondisi-kondisi yang mendorong timbulnya gagasan seperti itu adalah terisolasinya daerah-daerah pangkalan komunis secara geografis, ekonomis dan politis sejak tahun 1927 sampai tahun-tahun berikutnya.³¹ Sehingga setiap daerah pangkalan harus berdiri di atas kaki sendiri, mati hidupnya tergantung pada swa sembadanya dalam bidang militer dan ekonomi. Azas percaya pada diri sendiri itu mempunyai implikasi-implikasi nasional maupun internasional. Dalam skala internasional,

³⁰ Mohtar Mas'ood (Editor), *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2001, Hal 178

³¹ Ibid

kaum Komunis Cina tetap sensitif terhadap campur tangan dan penguasaan asing. Sekalipun mereka menyambut dukungan internasional dan ingin pula membantu negara-negara lain terhadap gerakan-gerakan yang mendapat simpati mereka, mereka tetap menegaskan bahwa setiap negara atau gerakan harus bersandar pada sumber-sumber dayanya sendiri demi mencapai tujuannya. Dalam skala nasional, PKC menghadapi masalah-masalah internal. Beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh PKC untuk menyelesaikan masalah-masalah internal tersebut dan untuk meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat Cina. Tetapi karena adanya azas percaya pada diri sendiri membuat PKC dapat bertahan dan melalui masalah-masalah internal tersebut secara mandiri.

Kongres Rakyat Nasional (KRN) merupakan badan perwakilan yang besar (12 delegasi pada tahun 1921, dan 2.217 delegasi pada tahun 2007), terdiri dari wakil-wakil yang dipilih oleh Kongres tingkat propinsi, angkatan bersenjata, dan orang-orang Cina perantauan.³² KRN mengadakan sidang sekali setahun dan anggota-anggotanya dipilih setiap empat tahun. KRN merupakan forum untuk mempelajari, mendukung, dan mengesahkan tindakan-tindakan pimpinan pusat; hal ini melambangkan bahwa ada dukungan dari rakyat Cina terhadap pemerintah.³³

Organ administratif utama RRC adalah Dewan Negara. Dewan Negara ini terdiri dari Perdana Menteri, wakil-wakil Perdana Menteri, dan kepala-kepala dari semua kementerian dan komisi. Dewan Negara mengatur dan mengendalikan seluruh struktur administratif dan bersama-sama dengan badan-badan tertinggi

³² Ted C. Fishman, *China Inc: Bagaimana Kedigdayaan China Menantang Amerika dan Dunia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta: 2006, hal. 356

³³ Mohtar Mas'ood (Editor), *Lop cit*, Hal. 124

PKC menyelenggarakan pemerintahan Cina. Dewan Negara ini berkedudukan di bawah kepemimpinan PKC.

Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejaksaan Rakyat Tertinggi merupakan organ-organ pengadilan, menyelidiki masalah-masalah dan memberikan putusan peradilan. Kejaksaan mempunyai kekuasaan yang bebas, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan pengawasan secara umum terhadap semua organ negara, termasuk pengadilan-pengadilan.

Struktur pemerintahan daerah di Cina pada dasarnya terdiri dari tiga tingkat pemerintahan resmi yaitu propinsi, kabupaten, dan dasar. Kekuasaan secara konstitusional diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Nasional dalam Dewan Negara.

Rekrutmen politik merupakan proses regenerasi yang wajib dilaksanakan oleh PKC untuk mempertahankan eksistensinya. Ada tiga tahapan penting (aktivis, kader, dan anggota partai) yang harus dilalui untuk menjadi anggota PKC. Aktivis adalah warganegara biasa, tidak memegang jabatan resmi, yang memiliki kepentingan, inisiatif, atau tanggung jawab khusus dalam kehidupan publik. Kader adalah mereka yang mempunyai kedudukan pimpinan resmi dalam suatu organisasi, biasanya berupa jabatan full-time. Sedangkan anggota partai tentu saja seperti umumnya anggota partai.

Menjadi seorang aktivis umumnya merupakan langkah pertama dalam proses rekrutmen politik atau proses menjadi pemimpin politik, dan sebagian kader-kader dan anggota-anggota PKC baru berasal dari jenjang aktivis. Organisasi partai lokal bekerja sama dengan para aktivis di lingkungan

kekuasaannya, dan dalam hal kampanye politik dan rekrutmen politik partai memakai tenaga para aktivis ini. Dalam praktek, para aktivis diangkat atas dasar pilihan sendiri, kemampuan pribadi dan dukungan kelompok, dan para pejabat lokal mengawasi proses itu dengan ketat. Rekrutmen untuk status kader berbeda sekali dengan hal di atas. "Kader-kader pemerintahan" yang memimpin pemerintahan, partai, dan hirarki organisasi massa di atas tingkat dasar dan yang menerima gaji dari pemerintah, diangkat dari dalam birokrasi melalui seksi-seksi personalia pemerintahan dan departemen-departemen dalam PKC.

Masalah paling serius dalam rekrutmen kader adalah pertikaian mengenai kriterianya, ada yang menekankan keahlian profesional dan ada yang menekankan kemurnian politik. Dalam praktek, terdapat kecenderungan untuk mengutamakan kualifikasi keahlian untuk rekrutmen kader non-partai, dan anggota-anggota partai diwajibkan mengenal kader-kader tersebut agar tetap "merah". Masuk menjadi anggota PKC merupakan tindakan yang menentukan dalam rekrutmen politik. Keanggotaan partai merupakan jalan utama menuju karier politik dengan kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh promosi dan kekuasaan. Anggota partai selalu diberi kedudukan yang secara politik penting. Urutan-urutan jenjangnya adalah: dari buruh biasa orang bisa dipilih menjadi aktivis, dari kalangan aktivis bisa diseleksi untuk naik ke status kader, dan dari kalangan ini kader partai mempunyai status lebih tinggi daripada status kader non-partai, dan akhirnya dari status kader partai bisa menjadi anggota partai.

Pembuat keputusan paling tinggi dalam sistem politik Cina adalah PKC, yang menentukan kebijaksanaan atas dasar alternatif-alternatif yang diberitahukan

kepadanya. Karena itu, struktur pembuatan keputusan itu merupakan struktur yang sempit, berdasar pada komite-komite partai yang mengambil keputusan dalam sidang tertutup.

Tidak adanya proses legislatif secara terbuka dan relatif menyebabkan hanya sedikit undang-undang publik yang diumumkan. Keputusan-keputusan cenderung berbentuk pernyataan umum tentang kebijaksanaan atau doktrin, atau muncul sebagai petunjuk-petunjuk atau peraturan-peraturan administratif. Walaupun pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan berdasarkan hukum, yang menyebutkan pelaksanaan dalam waktu tertentu dan prosedur-prosedur untuk memaksakan supaya dipatuhi, keputusan-keputusannya mengenai soal-soal penting seringkali bersifat sementara dan coba-coba.

Keputusan-keputusan dikeluarkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan umum, yang menunjukkan model-model yang harus diikuti atau tujuan-tujuan yang harus dicapai tetapi tidak menyebutkan prosedur-prosedurnya, bentuk-bentuknya, dan hubungan-hubungannya secara terperinci. Makna keputusan seperti itu hanya timbul dalam praktek, yaitu ketika tingkat-tingkat pemerintahan yang lebih rendah mulai mengembangkan tanggapan-tanggapan konkrit terhadap tugas-tugas yang dibebankan pada mereka.

Dalam proses ini, tingkat-tingkat pemerintahan yang lebih tinggi akan mulai meninjau dan menyelidiki hasil-hasil awalnya. Berdasarkan laporan-laporan ini. Orang-orang pusat bisa mempercepat atau memperlambat proses itu, mengumumkan model-model baru atau bahkan mengeluarkan petunjuk-petunjuk baru yang merubah tujuan kebijaksanaan yang pertama. Para anggota elite partai

nampaknya memandang perubahan-perubahan dan variasi-variasi itu sangat perlu untuk mengembangkan kebijaksanaan yang lebih tepat bagi rakyat Cina.

Kekuasaan untuk mengesahkan pembuatan keputusan tertinggi ada di tangan Politbiro PKC dan Komite Tetap. Para anggota Politbiro melaksanakan semua rapat PKC yang penting, dan tidak ada mekanisme teratur yang bisa dipakai oleh organ-organ lain untuk menolak keputusan-keputusan Politbiro. Kelompok kecil ini telah memperluas proses pembuatan kebijaksanaan dengan seringkali mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kelompok-kelompok elite lain yang memberi informasi, memperbaiki/mendukung, dan mengkritik rencana-rencana.

Kapasitas dari kepemimpinan inti partai untuk mengendalikan struktur pemerintahan sangat terbatas. Sekali keputusan-keputusan pusat telah menjadi instruksi-instruksi pusat, pengaruh desentralisasi dan garis massa mulai memainkan peranan. Unit-unit pemerintahan yang lebih rendah diijinkan untuk merencanakan peraturan-peraturannya sendiri atau paling tidak menginterpretasikan instruksi pemerintah pusat sesuai dengan kondisinya masing-masing dan sebagian besar keberhasilannya diserahkan pada tindakan-tindakan lembaga-lembaga tingkat dasar.

Sistem politik Cina mempercayakan pelaksanaan peraturan-peraturannya kepada berbagai struktur, meliputi birokrasi-birokrasi pemerintah, partai, dan militer dan sistem-sistem komunikasi yang mereka kuasai; organ-organ pengelolaan dari unit-unit primer; dan banyak komite-komite organisasi-

organisasi, dan pertemuan-pertemuan rakyat yang mengerahkan penduduk untuk menjalankan langsung program-program pemerintah.

Kaum Komunis Cina berusaha keras untuk membatasi penggunaan kekuasaan birokrasi. Sekalipun mereka mengakui perlunya hirarki organisasi yang diatur secara sentral, mereka berusaha agar birokrasi tanggap terhadap pengawasan yang dilakukan oleh penguasa politik (PKC) dan menjaga agar struktur birokrasi tetap sederhana dan efisien. Akibatnya, sejarah birokrasi di Cina setelah tahun 1949 penuh dengan usaha-usaha untuk memperluas kekuasaannya tetapi selalu mendapat tantangan kuat dari politisi partai.

Kecurigaan kaum Komunis Cina terhadap birokrasi berdasarkan dua prinsip pokok. Prinsip pertama menerima kenyataan bahwa sampai tingkat tertentu birokratisasi menjadi tidak efisien dan harus dibimbing oleh penguasa politik sehingga birokrasi harus tetap berada di bawah pimpinan politik dan bertingkah laku sesuai dengan doktrin garis massa. Prinsip kedua menyatakan bahwa birokrasi adalah suprastruktur yang tidak produktif dan terpisah dari garis depan perjuangan politik; oleh karena itu prinsip ini berusaha mengurangi ruang lingkup birokrasi dan menekankan desentralisasi dengan memindahkan kekuasaan-kekuasaan administratif ke pemerintahan daerah, sehingga unit-unit lokal itu mempunyai kesempatan untuk mengembangkan sumber-sumber dayanya sendiri. Yang mendasari pandangan ini adalah keyakinan untuk membentuk kebudayaan politik, pemerintah daerah harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan politik dan ini tidak dapat direalisasikan di bawah suatu sistem yang sangat tersentralisir.

B. Sistem Ekonomi

Sistem perekonomian Republik Rakyat Cina merupakan yang terbesar kedua di dunia dengan PDB lebih dari \$6,9 trilyun (2007) bila diukur pada basis paritas daya beli (*purchasing power parity* (PPP)). Pada bulan November 2007, RRC menjadi negara dengan PDB terbesar ketiga di dunia setelah A.S. dan Jepang dengan PDB nominal US\$3,42 trilyun (2007) bila diukur dalam ukuran kurs.³⁴ Sejak reformasi pasar bebas pada tahun 1978 PDB Cina tumbuh rata-rata 9,9 persen per tahun.³⁵ Pendapatan per kapita Cina tumbuh dengan laju tahunan rata-rata lebih dari 8% selama tiga dekade terakhir, kemiskinan menurun drastis, tetapi pertumbuhan yang cepat ini disertai oleh ketidaksamarataan pendapatan yang semakin meningkat.³⁶ Pendapatan per kapita negara ini digolongkan sebagai rendah menurut standar-standar dunia, kira-kira \$2.000 (nominal, ke-107 dari 179 negara/perekonomian), dan \$7.800 (PPP, ke-82 dari 179 negara/perekonomian) pada tahun 2006, menurut Dana Moneter Internasional.

Sejak akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, reformasi ekonomi pada mulanya dimulai dari pergeseran pekerjaan pertanian menuju sistem tanggung jawab rumah tangga untuk memulai menghapus pertanian kolektif secara bertahap, dan selanjutnya diperluas sehingga meliputi liberalisasi harga secara bertahap; desentralisasi fiskal; peningkatan otonomi bagi perusahaan-perusahaan negara yang meningkatkan wewenang pejabat-pejabat pemerintah

³⁴ "China's GDP grows 11.4% in 2007, fastest in 13 years", China Daily, 24 Januari 2008

³⁵ "China's Economic Growth Cools to Slowest Since 2005", Bloomberg L.P., 17 Juli 2008

³⁶ "Reducing Inequalities in China Requires Inclusive Growth", Asian Development Bank, News Release, 9 August 2007

lokal dan manajer-manajer pabrik pada industri yang memungkinkan berbagai perusahaan swasta dalam jasa dan pabrikan ringan; fondasi sistem perbankan yang beragam; pengembangan pasar saham; pertumbuhan sektor non-negara yang cepat, dan pembukaan perekonomian menuju peningkatan perdagangan luar negeri dan investasi asing. Cina pada umumnya melaksanakan reformasi dengan cara gradualist, yang meliputi penjualan ekuitas bank-bank negara terbesar Cina kepada investor-investor asing dan perbaikan dalam pasar kurs dan obligasi pada pertengahan tahun 2000-an. Ketika perannya dalam perdagangan dunia tumbuh dengan mantap, arti pentingnya bagi perekonomian internasional juga meningkat dengan cepat. Perdagangan luar negeri Cina tumbuh lebih cepat daripada PDB-nya selama 25 tahun terakhir.³⁷ Sejak tahun 2007, sebagian besar pertumbuhan Cina berasal dari sektor swasta daripada sektor ekspor. Khususnya, sektor publik yang lebih kecil, yang didominasi oleh kira-kira 200 perusahaan negara yang besar yang berkonsentrasi sebagian besar pada BUMN, industri besar, dan sumber daya energi.³⁸

Cina menekankan peningkatan pendapatan pribadi dan konsumsi serta memperkenalkan sistem manajemen baru untuk membantu meningkatkan produktivitas. Pemerintah juga berfokus pada perdagangan luar negeri sebagai alat utama untuk pertumbuhan ekonomi. PDB Cina meningkat sepuluh kali sejak tahun 1978, sebagian besar akibat reformasi ekonomi yang meliputi liberalisasi

³⁷ Baizhu Chen dan Yi Feng, "Determinants of economic growth in China: Private enterprise, education, and openness", *China Economic Review*, Juni 2000

³⁸ "China Is a Private-Sector Economy", *Business Week*, 22 Agustus 2005

perekonomian mereka.³⁹ Beberapa ekonom meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Cina sebenarnya akan jatuh selama tahun 1990-an dan awal 2000-an, sejumlah faktor-faktor dalam pertumbuhan yang didorong oleh sektor swasta belum diyakini akan dapat bertahan sampai sejauh mana. Kelebihan Cina pada ekspor juga dianggap terlalu berlebihan.⁴⁰ Namun demikian, kemacetan-kemacetan (*bottle neck*) utama terus menghalangi pertumbuhan. Energi yang ada tidak memadai untuk berjalan pada kapasitas industrial yang terpasang penuh, sistem transportasi tidak memadai untuk menggerakkan kuantitas yang mencukupi dari bahan-bahan penting seperti batu-bara, dan sistem komunikasi tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan perekonomian dari ukuran dan kompleksitas Cina.

Akan tetapi dua sektor perekonomian yang paling penting berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Cina. Kedua sektor itu adalah pertanian dan industri, yang secara bersama-sama memakai lebih dari 70 persen angkatan kerja dan menghasilkan lebih dari 60 persen PDB.⁴¹ Dua sektor tersebut berbeda dalam banyak hal. Teknologi, produktivitas tenaga kerja, dan pendapatan berjalan jauh lebih cepat dalam industri dibandingkan sektor pertanian. Hasil pertanian sangat tergantung pada pengaruh dari cuaca, sedangkan industri banyak dipengaruhi oleh pemerintah. Perbedaan antara dua sektor ini bergabung membentuk kesenjangan ekonomi-budaya-sosial antara wilayah pedesaan dan perkotaan, yang merupakan pembagian utama dalam masyarakat Cina. Keberhasilan sektor perekonomian ini

³⁹ Dikutip dari <https://www.cia.gov/library/publication/the-world-factbook/geos/ch.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2008, pukul 19.00

⁴⁰ "An old Chinese myth", *The Economist*, 3 Januari 2008

⁴¹ Dikutip dari <http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/3732369.stm>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2008, pukul 18.00

dipengaruhi langsung oleh kebijakan pemerintah. Cina merupakan produsen beras terbesar di dunia dan berada diantara sumber-sumber utama dari gandum, jagung, tembakau, kedelai, kacang tanah, dan kapas. Negara ini merupakan salah satu produsen terbesar di dunia dalam sejumlah produk industri dan mineral, yang meliputi pakaian kapas, tungsten (unsur logam keras), dan antimony (logam putih), dan merupakan produsen penting dalam benang kapas, batu bara, minyak mentah, dan sejumlah produk lainnya. Sumber daya-sumber daya mineralnya barangkali yang paling kaya di dunia tetapi hanya sebagian yang dikembangkan. Cina mendapat fasilitas-fasilitas produksi yang sangat canggih melalui perdagangan dan juga membangun sejumlah pabrik berteknologi maju yang mampu membuat berbagai peralatan canggih, termasuk senjata nuklir dan satelit.

Setelah Rapat Besar Ketiga Partai Komunis Cina, yang diadakan pada bulan Oktober 2003, legislator-legislatur Cina memperkenalkan beberapa pengajuan amandemen pada konstitusi negara. Salah satu yang paling signifikan adalah proposal untuk memberi perlindungan kepada hak-hak milik pribadi. Legislator-legislatur juga menekankan bahwa akan ada penekanan pada aspek-aspek tertentu dari keseluruhan kebijakan ekonomi pemerintah, yang meliputi upaya-upaya untuk mengurangi pengangguran (sekarang dalam rentang 8-10% di wilayah-wilayah perkotaan), menyeimbangkan kembali distribusi pendapatan antara wilayah-wilayah perkotaan dan pedesaan, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi sambil melindungi lingkungan dan meningkatkan ekuitas

sosial. Kongres Rakyat Nasional menyetujui amandemen-amandemen tersebut ketika mereka bertemu pada bulan Maret 2004.⁴²

Rapat Besar Kelima pada bulan Oktober 2005 menyetujui Program Ekonomi Lima Tahun (2006-2010) yang bertujuan membangun “masyarakat harmonis” melalui distribusi kekayaan yang lebih berimbang dan pendidikan yang membaik, perawatan medis, dan jaminan sosial. Pada bulan Maret 2006, Kongres Rakyat Nasional menyetujui Program Lima Tahun ke-11. Rencana tersebut membutuhkan kenaikan 5% yang relatif konservatif dalam intensitas energi (konsumsi energi per unit PDB) menjelang tahun 2010.⁴³

Perekonomian Cina tumbuh dengan laju rata-rata 10% per tahun selama periode 1990-2004, laju pertumbuhan tertinggi di dunia. PDB Cina tumbuh 10,0% pada tahun 2003, 10,1% pada tahun 2004, dan bahkan lebih cepat 10,4% pada tahun 2005 meskipun terdapat upaya-upaya oleh pemerintah untuk mendinginkan perekonomian. Total perdagangan Cina pada tahun 2006 melampaui \$1,76 trilyun, yang menjadikan Cina sebagai negara pedagang terbesar ketiga di dunia setelah A.S. dan Jerman. Pertumbuhan tinggi demikian adalah mesti jika Cina ingin menciptakan 15 juta pekerjaan yang dibutuhkan setiap tahun untuk mempekerjakan pendatang-pendatang baru kedalam pasar kerja.

Namun demikian, terdapat ketidakseimbangan-ketidakseimbangan serius dibelakang kinerja perdagangan spektakuler, arus investasi yang tinggi, dan pertumbuhan PDB yang tinggi yaitu angka pinjaman macet yang tinggi melemahkan sistem perbankan yang dijalankan negara. BUMN (SOE) yang tidak

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

efisien masih merupakan hambatan pada pertumbuhan, meskipun terdapat upaya-upaya menonjol untuk mereformasi, menjual, menggabungkan, atau menutup sebagian besar BUMN.⁴⁴ Indikator-indikator sosial dan ekonomi meningkat sejak reformasi-reformasi diluncurkan, tetapi masih terdapat ketidaksamarataan yang semakin meningkat antara provinsi-provinsi yang sangat maju dan wilayah pedalaman yang kurang maju dan lebih miskin. Menurut estimasi-estimasi Bank Dunia pada tahun 2007, kira-kira 300 juta orang di Cina— sebagian besar di wilayah-wilayah pedesaan yang berada di provinsi-provinsi pedalaman yang tertinggal – masih hidup dalam kemiskinan, mengkonsumsi kurang. Hal tersebut menjadikan populasi miskin kira-kira seukuran seluruh populasi Amerika Serikat. Kira-kira 35% populasi Cina hidup dibawah \$1 sehari.⁴⁵

Sejak tahun 1949 pemerintah, dibawah sistem politik dan ekonomi sosialis Cina, bertanggung jawab untuk perencanaan dan pengelolaan perekonomian nasional. Pada awal tahun 1950-an, sistem perdagangan luar negeri dimonopoli oleh negara. Hampir semua perusahaan dimiliki oleh negara dan pemerintah menentukan harga-harga untuk komoditi-komoditi utama, mengontrol tingkat dan distribusi umum dari dana investasi, menentukan target-target output untuk perusahaan-perusahaan utama dan cabang-cabang, mengalokasikan sumber daya energi, menetapkan tingkat upah dan target kesempatan kerja, mengoperasikan jaringan grosir dan eceran, dan menyetir kebijakan keuangan dan sistem perbankan. Di daerah pedalaman dari pertengahan tahun 1950-an, pemerintah

⁴⁴ Dikutip dari <http://www.ft.com/cms/s/0/dee3a0d2-9218-11dc-8981-000079fd2ac.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2008, pukul 21.00

⁴⁵ Dikutip dari http://en.wikipedia.org/list_of_countries_by_percentage_of_population_living_in_poverty, diakses pada tanggal 26 Agustus 2008, pukul 21.30

menentukan pola penanaman, menetapkan level harga, dan menentukan target-target output untuk semua komoditi utama.⁴⁶

Sejak tahun 1978 ketika reformasi-reformasi ekonomi dibentuk, peran pemerintah dalam perekonomian menurun. Output industri oleh perusahaan-perusahaan negara menurun perlahan, meskipun dewasa ini industri-industri yang kurang strategis masih mayoritas dimiliki oleh negara. Peran pemerintah dalam mengelola perekonomian telah dikurangi dan peran perusahaan swasta dan kekuatan pasar meningkat, namun pemerintah masih mempertahankan peran utama dalam perekonomian perkotaan. Dengan kebijakan-kebijakannya tentang isu-isu seperti pengadaan pertanian, pemerintah juga mempertahankan pengaruh utama pada kinerja sektor pedesaan. Konstitusi negara tahun 1982 menetapkan bahwa negara menuntun pembangunan ekonomi negara dengan mengambil keputusan-keputusan umum tentang prioritas-prioritas ekonomi dan kebijakan-kebijakan, dan bahwa Dewan Negara, yang melaksanakan kontrol eksekutif, bertugas mengarahkan lembaga-lembaga bawahannya dalam membuat dan melaksanakan rencana ekonomi nasional dan anggaran negara. Sebagian besar sistem pemerintahan (birokrasi) dicurahkan untuk mengelola perekonomian dalam rantai komando atas-ke-bawah dengan hampir lebih dari 100 menteri, komisi, administrasi, biro, akademi, dan korporasi dibawah Dewan Negara memperhatikan masalah-masalah ekonomi.

Setiap sektor ekonomi yang signifikan diawasi dan dikontrol oleh satu atau lebih dari organisasi-organisasi ini, yang meliputi Bank Rakyat Cina, Komisi

⁴⁶ Dikutip dari http://en.wikipedia.org/list_of_socialist_countries, diakses pada tanggal 26 Agustus 2008, pukul 18.00

Pembangunan dan Reformasi Nasional, Menteri Keuangan, dan kementerian pertanian; industri batu-bara; perdagangan; komunikasi; pendidikan; industri ringan; industri metalurgi; minyak; kereta api; industri tekstil; dan sumber daya air dan tenaga listrik. Beberapa aspek perekonomian diatur oleh departemen-departemen khusus di bawah Dewan Negara, yang meliputi Biro Statistik Nasional, Lembaga Penerbangan Sipil Cina, dan biro pariwisata. Setiap organisasi ekonomi di bawah Dewan Negara menuntut unit-unit dibawah yurisdiksinya melalui kantor-kantor bawahan pada tingkat provinsi dan lokal.

Proses pengambilan kebijakan keseluruhan melibatkan konsultasi dan negosiasi ekstensif.⁴⁷ Kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan ekonomi yang dipakai oleh Kongres Rakyat Nasional dan Dewan Negara akan diteruskan ke organisasi-organisasi ekonomi dibawah Dewan Negara, yang menggabungkannya ke dalam rencana-rencana untuk berbagai sektor perekonomian. Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan ekonomi dilaksanakan oleh berbagai mekanisme kontrol langsung dan tidak langsung. Kontrol langsung digunakan dengan menentukan kuota-kuota output fisik khusus dan alokasi-alokasi persediaan untuk beberapa barang dan jasa. Instrumen-instrumen tak langsung juga disebut "pengungkit-pengungkit ekonomi" berjalan dengan mempengaruhi insentif-insentif pasar. Ini meliputi memungut pajak, menetapkan harga untuk produk-produk dan persediaan-persediaan, mengalokasikan dana-dana investasi, memonitor dan mengontrol alokasi sumber daya-sumber daya utama, seperti tenaga ahli, tenaga listrik, transportasi, baja, dan bahan-bahan kimia

⁴⁷ John Starr, *Understanding China: A Guide to China's Economy, History, and Political Culture*. Hill and Wang, London:2001, hal 140

(termasuk pupuk). Keunggulan utama dari memasukkan sebuah proyek dalam rencana tahunan adalah bahwa bahan mentah, tenaga kerja, sumber daya keuangan, dan pasar dijamin oleh kebijakan-kebijakan negara yang memiliki bobot hukum dibelakangnya.

Akan tetapi, dalam kenyataannya, banyak aktivitas ekonomi berjalan diluar cakupan rencana yang terinci, dan kecenderungannya adalah rencana menjadi lebih sempit daripada luas cakupannya. Sasaran utama dari program reformasi adalah mengurangi penggunaan kontrol langsung dan meningkatkan peran pengungkit-pengungkit ekonomi tak langsung. Perusahaan-perusahaan utama milik negara masih menerima rencana-rencana terinci yang menentukan kuantitas-kuantitas fisik input dan produk utama dari kementerian-kementerian mereka. Akan tetapi, korporasi-korporasi ini semakin dipengaruhi oleh harga dan alokasi yang ditentukan melalui interaksi pasar dan hanya dipengaruhi secara tak langsung oleh rencana pusat.

Total perusahaan ekonomi di Cina dijatahkan sepanjang garis perencanaan direktif (wajib), perencanaan indikatif (implementasi tak langsung dari petunjuk-petunjuk pusat), dan yang disisakan ke kekuatan-kekuatan pasar. Pada awal tahun 1980-an selama reformasi-reformasi awal, perusahaan-perusahaan mulai meningkatkan kebijaksanaan terhadap kuantitas-kuantitas input yang dibeli, sumber-sumber input, ragam produk yang dibuat, dan proses produksi. Pengawasan operasional terhadap proyek-proyek ekonomi terutama dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kotamadya, dan kecamatan. Mayoritas perusahaan industri milik negara, yang dikelola pada level provinsi atau dibawahnya,

sebagian diatur oleh kombinasi alokasi khusus dan kontrol tak langsung, tetapi mereka juga memproduksi barang diluar rencana untuk penjualan di pasar. Sumber daya manusia dan alam yang penting dan langka – misalnya insinyur atau baja jadi— bisa dimasukkan pada jenis unit ini dalam angka pasti. Pengaturan personalia dan bahan yang kurang penting diotorisasi dengan cara umum oleh rencana tersebut, tetapi dengan pengaturan pengadaan yang disisakan pada manajemen perusahaan.

Selain itu, perusahaan-perusahaan itu sendiri memperoleh peningkatan kemandirian dalam berbagai aktivitas. Meskipun industri dan jasa yang penting secara strategis dan kebanyakan konstruksi skala besar masih berada dibawah perencanaan direktif, namun perekonomian pasar mendapat keuntungan secara cepat dalam skala setiap tahun.⁴⁸ Secara keseluruhan, sistem industri Cina mengandung gabungan hubungan yang kompleks. Dewan Negara pada umumnya melaksanakan kontrol yang relatif ketat terhadap sumberdaya-sumberdaya yang dianggap penting untuk kinerja dan kesehatan perekonomian keseluruhan. Aspek-aspek perekonomian yang kurang penting ditransfer ke level yang lebih rendah untuk keputusan-keputusan terinci dan manajemen. Selanjutnya, kebutuhan untuk mengkoordinasi entitas-entitas yang berada dalam hirarki organisasi yang berbeda menimbulkan banyak tawar-menawar dan pencapaian konsensus secara informal.

Pada kadar yang terbatas, pengeluaran konsumen merupakan subjek dari pengaruh pemerintah langsung tetapi terutama ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar dasar dari tingkat pendapatan dan harga komoditi. Sebelum periode

⁴⁸ Robert C. Hsu, *The political economy of guidance planning in Post-Mao China. Review of World Economics*, 1 Oktober 2007

reformasi, barang-barang utama dijatahkan ketika mereka kekurangan persediaan, tetapi menjelang pertengahan tahun 1980-an ketersediaan meningkat pada titik dimana penjatahan dihentikan untuk segala sesuatu kecuali padi-padian, yang juga bisa dibeli di pasar bebas. Unit-unit yang dimiliki secara kolektif dan sektor pertanian diatur terutama oleh instrumen-instrumen tak langsung. Setiap unit kolektif bertanggung jawab untuk laba dan ruginya sendiri dan harga input dan produknya memberi insentif produksi utama.

Perubahan-perubahan cepat dilakukan dalam melonggarkan kontrol negara terhadap sektor pertanian dari akhir tahun 1970-an. Mekanisme struktural untuk melaksanakan sasaran-sasaran negara dihilangkan seluruhnya atau dikurangi banyak.⁴⁹ Insentif-insentif usaha tani dipertinggi melalui peningkatan harga untuk produk-produk pertanian yang dibeli negara, dan diijinkan untuk menjual kelebihan produksi pada pasar bebas. Terdapat lebih banyak ruang dalam pilihan tanaman apa yang akan ditanam, dan petani diijinkan mengontrak untuk tanah yang dipakainya bekerja, daripada hanya mengerjakan tanah secara kolektif. Sistem kuota pengadaan (yang ditetapkan dalam formulir kontrak) dihapus secara bertahap, meskipun negara masih membeli produk-produk pertanian dan mengontrol surplus-surplus pertanian untuk mempengaruhi kondisi-kondisi pasar.

Perdagangan luar negeri diawasi oleh Menteri Perdagangan, kepabeanan, dan Bank Cina yang mengontrol akses terhadap mata uang asing yang diperlukan bagi impor. Sejak pembatasan-pembatasan pada perdagangan luar negeri dikurangi, terdapat peluang-peluang luas bagi perusahaan-perusahaan individual

⁴⁹ Simon Powell, *Agricultural Reform in China: From Communes to Commodity Economy, 1978-1990*. Manchester University Press, London:1991, hal 128

untuk terlibat dalam perdagangan dengan perusahaan-perusahaan asing tanpa banyak intervensi dari lembaga-lembaga resmi.

Meskipun pemerintah masih mendominasi perekonomian dalam bagian-bagian tertentu, tingkat kontrolnya dibatasi oleh volume aktivitas ekonomi semata. Selanjutnya, konsep pengawasan pemerintah terhadap perekonomian berubah dari konsep kontrol negara langsung menjadi konsep pedoman tak langsung terhadap perekonomian yang lebih dinamis.

Sistem transportasi Cina menghasilkan variasi-variasi signifikan dalam perekonomian regional Cina. Pembangunan ekonomi pada umumnya lebih cepat di provinsi-provinsi pesisir daripada di dalam negeri, dan terdapat perbedaan besar dalam pendapatan per kapita antara wilayah-wilayah. Tiga wilayah paling kaya ada sepanjang pantai tenggara, yang berpuat pada Pearl River Delta; sepanjang pantai timur, yang pusat pada Sungai Lower Yangtze; dan dekat Teluk Bohai, di wilayah Beijing-Tianjin-Liaoning. Perkembangan cepat dari wilayah-wilayah ini diharapkan memiliki efek signifikan pada perekonomian regional secara keseluruhan, dan kebijakan pemerintah Cina dirancang untuk menghilangkan kendala-kendala pada percepatan pertumbuhan di wilayah-wilayah yang lebih kaya ini.

Pertumbuhan ekonomi RRC yang sangat signifikan dalam tempo waktu yang sangat singkat ini merupakan hal yang sangat menonjol dari RRC saat ini. Sejak reformasi ekonomi 1 generasi silam, Gross Domestic Product (GDP) Cina

tumbuh dengan angka resmi 9,5% per tahun (13,687 miliar yuan).⁵⁰ Dan dalam kurun waktu 30 tahun perekonomian Cina tumbuh hampir 3 kali lipat. Kenaikan ini tidak ada duanya dalam sejarah modern.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh RRC saat ini berawal dari penancangan Modernisasi 4 Bidang sebagai hasil dari Sidang Pleno III dari Komite Sentral Partai Komunis Cina pada bulan Desember tahun 1978. Modernisasi tersebut meliputi, pertanian, industri, pertahanan nasional, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Penancangan Modernisasi 4 Bidang juga merupakan titik balik arah perkembangan RRC dari era dogmatisme dengan gerakan-gerakan massalnya menuju pada era pragmatisme sekaligus awal dari kepemimpinan Deng Xiao Ping.

Pembangunan nasional dengan Modernisasi 4 Bidang RRC dititikberatkan pada pembangunan ekonomi. Sejalan dengan itu, RRC menganut *Open Door Policy*. Sejak itu, RRC mulai membuka diri untuk penanaman modal asing/investasi dari berbagai negara.

Orientasi pemerintah Cina bukan lagi pada pengembangan ideologi komunis tetapi pada pengembangan ekonomi. Pemerintah menyadari bahwa RRC telah jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara lainnya. Untuk itu, usaha-usaha untuk mengembangkan perekonomian dilakukan.

Sejak reformasi ekonomi dan penancangan kebijakan pintu terbuka, RRC telah mengalami peningkatan kualitas dan nilai investasi asing. Hal ini memiliki peranan yang sangat berarti bagi perkembangan ekonomi dan sosial di Cina.

⁵⁰ Ted C. Fishman, *China Inc: Bagaimana Kedigdayaan Cina Menantang Amerika dan Dunia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta: 2006, hal. xxiii

Begitu pun dengan perdagangan luar negeri yang terus berkembang pesat. Mitra dagang RRC tersebar di seluruh penjuru dunia mencapai 227 negara.

RRC yang tengah berkembang secara konstan telah memberikan pasar serta peluang komersil yang sangat besar bagi modal serta teknologi dari seluruh negara di dunia. Investasi-investasi asing yang ada di Cina saat ini, berasal dari lebih 180 negara di dunia. Selain itu, RRC juga telah menjadi lahan investasi sekitar 450 perusahaan besar dari 500 perusahaan besar yang ada di dunia. Begitu pun dengan investasi asing dalam bentuk lain, seperti pinjaman yang diberikan oleh pemerintah asing serta lembaga-lembaga keuangan internasional dengan nilai lebih dari 14 miliar dollar AS. Sejak tahun 1993, Cina dalam 7 tahun berturut-turut merupakan negara berkembang yang paling banyak menarik investasi asing. Memasuki pembangunan lima tahun ke-11 (2006-2010), pemerintah mencoba untuk mendorong modernisasi 4 bidang dengan sektor industri sebagai basis utama perekonomian. Dan untuk itu, zona pengembangan ekonomi dijadikan sebagai faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Cina. Peran zona pengembangan ekonomi yang terencana sendiri telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak awal pencaangan modernisasi.

Kemajuan ekonomi yang dicapai oleh Cina saat ini dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain:

1. Didorong oleh perubahan kebijakan ekonomi secara agresif dan menjadikan mekanisme pasar yang terkontrol sebagai fondasi perekonomian.

2. Transformasi dimulai dari sektor pertanian dengan membiarkan petani memilih dan memutuskan sendiri komoditas yang hendak diproduksi, yang sebelumnya hal ini ditentukan oleh negara. Kebijakan ini kemudian diperluas ke sektor industri dan jasa.
3. Pangaturan harga diubah pada tahun 2000, dan kontrol harga dihapus.
4. Diluncurkan hukum yang mengizinkan swasta untuk mempunyai perusahaan.
5. Diluncurkan kebijakan persaingan, menarik investasi asing secara langsung, menurunkan tarif impor, menghapus monopoli BUMN dalam ekspor dan mengakhiri sistem kurs mata uang ganda.
6. Arah perekonomian dengan menggunakan model mekanisme pasar yang terkontrol dilanjutkan dengan menjadi anggota WTO
7. Sejak 1998, perusahaan swasta kecil diizinkan.
8. Pada 2004, ditekankan peran non-BUMN sebagai basis perekonomian.
9. Peraturan baru diluncurkan untuk melindungi pengambilalihan aset swasta.
10. Pada 2005, sektor swasta bebas berbisnis di infrastruktur, jasa umum dan keuangan, yang sebelumnya dilarang. Itu artinya mengizinkan peran swasta secara penuh dalam perekonomian.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB IV
TANTANGAN DAN PELUANG DEMOKRATISASI DI REPUBLIK
RAKYAT CINA

A. Tantangan Demokratisasi

Untuk menjaga dan mempertahankan kemajuan yang telah dicapai dalam bidang ekonomi, pemerintah RRC dan Partai Komunis Cina (PKC) merasa perlu untuk mempertahankan stabilitas politik. Demokratisasi akan dilaksanakan secara bertahap. PKC menganggap bahwa sistem kendali terpusat melalui kontrol PKC atas negara merupakan cara yang paling efektif untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban internal. Stabilitas politik yang dicapai saat ini dianggap merupakan dasar bagi kemajuan ekonomi Cina.

Pemerintah Cina menganggap masih merasa perlu juga untuk tetap mempertahankan simbol-simbol paham komunisme, khususnya dalam bidang bidang politik. Simbol-simbol paham komunisme ini dianggap dapat menyatukan seluruh masyarakat Cina. Simbol-simbol ini dianggap dapat mengurangi terjadinya potensi konflik antara sesama kelompok masyarakat.

Dampak dari adanya stabilitas politik yang kuat di RRC akan menciptakan kepercayaan yang kuat pula dari komunitas internasional, khususnya kalangan bisnis. Adanya hukum yang kuat, adanya jaminan untuk berusaha dengan bebas, adanya ketersediaan tenaga kerja yang murah, adanya ketersediaan sumber daya alam, serta adanya stabilitas politik yang kuat merupakan faktor-faktor yang menyebabkan investasi dari komunitas internasional masuk ke RRC. PKC

menganggap bahwa berkat sistem komunis kemajuan dalam bidang ekonomi bisa dicapai. Oleh karena itu PKC, terus memperkaya dan memperdalam ideologi komunis melalui berbagai sarana-sarana sosialisasi kebijakan PKC agar menjadi budaya bagi masyarakat Cina melalui:

1. Keluarga. Kaum Komunis Cina memandang organisasi keluarga tradisional sebagai pemelihara penindasan, nilai-nilai reaksioner, dan oposisi potensial terhadap sosialisme. Karena itu, mereka mencoba merubah sistem keluarga itu dengan cara-cara yang tidak menimbulkan banyak ketegangan dan perlawanan. Penguasa komunis berusaha menciptakan kehidupan keluarga yang sesuai dengan norma-norma sosialisasi politik yang diciptakannya. Tindakan paling penting adalah pengesahan "undang-undang perkawinan" pada tahun 1950, yang menetapkan persamaan hukum antara laki-laki dan wanita dan melarang pengaturan-pengaturan perkawinan secara tradisional maupun oleh lembaga-lembaga keluarga.
2. Pendidikan umum. Sistem pendidikan umum yang ada di Cina sejak tahun 1949 merupakan salah satu alat yang paling efektif untuk mengubah sikap politik orang-orang Cina. Tidak seperti keluarga, yang tidak mempunyai pengaruh terhadap setiap orang dalam usia dewasa sehingga sulit dikontrol oleh penguasa, sekolah memberikan mekanisme yang mudah dikontrol untuk mengendalikan warganegara yang telah mencapai usia sekolah. Pendidikan bagi seluruh rakyat merupakan tujuan yang paling pokok dari sistem komunis. Untuk mengikutsertakan masyarakat menanggung beban

sosialisasi dan menciptakan masyarakat yang melek huruf sebagai syarat pendidikan politik dan keterlibatan politik, sekolah diharuskan menampung hampir seluruh penduduk berusia sekolah.

3. Jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi Cina, sebagaimana dalam masyarakat-masyarakat lain, meliputi berbagai jenis dan isi pesan. Ciri yang paling penting adalah bahwa jaringan komunikasi itu hampir seluruhnya merupakan usaha partai atau negara secara resmi, di mana isi dan pengelolaannya dikendalikan oleh para penguasa politik pusat. Masyarakat hanya diberi tahu tentang hal-hal yang menurut elite politik itu perlu; pesan yang saling bersaing dan berlawanan tidak mendapatkan tempat dalam jaringan semacam ini. Ciri khusus dari komunikasi politik di Cina adalah pengaruh kuat ideologi dan perbendaharaan katanya yang khas. Sebagian besar komunikasi dilakukan dalam bahasa ideologi resmi, yang merupakan mekanisme penyatu bagi yang menyetujuinya dan penyaring bagi yang tidak menyetujuinya. Akibatnya, komunikasi resmi pada umumnya ditujukan kepada elite atau sub-elite yang memahami perbincangan ideologi dan merasa ikut bertanggung jawab menerapkannya, menurut kondisi masing-masing daerah, kepada seluruh rakyat. Gaya komunikasi publik ini bersifat mendidik. Seperti slogan Lompatan Besar menyatakan bahwa "seluruh wilayah negara adalah ruang sekolah", dan sistem komunikasi itu memainkan bagian penting dalam pendidikan atau pendidikan kembali masyarakat Cina. Kepada segenap warga negara secara teratur disampaikan pesan yang padat dengan isi

politik melalui media resmi. Dengan demikian, warga negara memperoleh tambahan pengetahuan umum tentang pemimpin-pemimpin dan masalah-masalah politik, meningkatkan perasaan identifikasi terhadap sistem politik nasional, dan mendorong para warga negara agar mau menerima tuntutan-tuntutan dan nilai-nilai elite politik. Intensitas komunikasi diperkuat dengan menganjurkan diskusi dan studi di bawah pimpinan seorang kader atau aktivis politik. Singkatnya, sistem komunikasi adalah alat sosialisasi yang paling efektif dalam memperluas pengetahuan tentang politik dan meningkatkan kepekaan terhadap soal-soal politik.

4. Pengalaman politik dan sosial. Salah satu dari tujuan-tujuan PKC yang paling ambisius adalah mengikutsertakan setiap warga negara Cina dalam kegiatan politik secara teratur dan terorganisir pada tingkat dasar, terutama melalui gerakan-gerakan massa, perwakilan dalam pemerintahan tingkat rendah, keanggotaan dalam organisasi-organisasi massa, dan partisipasi dalam pengelolaan unit-unit produksi dan unit-unit pemukiman. Pada umumnya, inisiatif dan pengendalian atas kegiatan-kegiatan ini dipegang oleh penguasa yang lebih tinggi, sehingga beberapa "peserta" dalam kegiatan itu sekedar menjalankan perintah atasannya itu tanpa memahaminya dan tanpa semangat. Dalam keadaan demikian pun, para peserta itu bisa belajar sesuatu tentang proses pemerintahan, kemungkinan-kemungkinan yang bisa diperoleh dari perkumpulan politik, dan hubungan mereka dengan politik.

Sarana-sarana sosialisasi ideologi komunis tersebut digunakan untuk mempertahankan kebenaran bahwa sistem komunis adalah yang paling cocok bagi RRC. Akan tetapi hal ini berlawanan dengan pandangan Deng Xiaoping yang menyatakan bahwa "tidak masalah kucingnya hitam atau putih, asalkan ia bisa menangkap tikus". Bertahannya sistem komunis di Cina karena sistem itu dianggap yang paling cocok untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Cina. Kejatuhan sistem komunis akan terjadi jika sistem ini sudah dianggap tidak mampu lagi untuk mendukung kemajuan yang telah tercapai dalam bidang ekonomi. Kemajuan itu akan menuntut adanya hak kebebasan yang lebih, misalnya kebebasan berbicara dan berpendapat. Sistem komunis yang otoriter tidak dapat mendukung hal tersebut sehingga akan mendorong sistem itu untuk mau beradaptasi dengan kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat Cina. Kemampuan dan kemauan untuk beradaptasi dengan kemajuan yang telah tercapai karena kemajuan dalam bidang ekonomi akan menciptakan peluang terjadinya demokratisasi dalam sistem komunis, sehingga memunculkan suatu sistem demokrasi dengan model Cina.⁵¹

Selain itu pada pertengahan tahun 1980-an Qian Xueshen, Ketua Komite Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mengusulkan kepada Deng Xiaoping agar pada tahun 2000 semua pegawai pemerintah adalah lulusan universitas, pemimpin tingkat kabupaten memiliki gelar master, dan semua menteri maupun wakil menteri harus bergelar doktor. Usulan ini diterima oleh Deng tetapi mengalami beberapa perubahan. Pada kongres ke-12 PKC (1982), masuk

⁵¹ *Harian Kompas*, Edisi Kamis 31 Maret 2003, hal. 34

kelompok berpendidikan tinggi ke jajaran puncak kepemimpinan Cina. Sejumlah 64 anggota Komite Sentral Partai mengundurkan diri (yang rata-rata berusia 70-80 tahun dan kurang terdidik) diganti oleh anggota baru, 76 persen di antaranya adalah lulusan universitas. Di antara mereka ini adalah Li Peng, Hu Qili, Jiang Zemin, Hu Jintao, Wu Bangguo, dan Wang Zhaoguo.⁵²

Sejak saat itu hampir semua lulusan universitas masuk ke semua lini kepemimpinan. Antara tahun 1978-1998, misalnya, mereka yang lulusan universitas di lingkungan politbiro meningkat dari 23 persen menjadi 92 persen, di lingkungan menteri dan wakil menteri, naik dari 38 persen menjadi 95 persen, dan di lingkungan militer naik 4 persen menjadi 78 persen. Antara tahun 1980-1986, 469.000 lulusan universitas menduduki posisi kepemimpinan tingkat kabupaten ke atas. Pada akhir tahun 1998, dari 61 juta anggota PKC, 11 juta diantaranya adalah lulusan universitas.

Pada tahun 2008, Wan Gang, seorang ahli hematologi lulusan Perancis yang bekerja selama satu dasawarsa pada perusahaan mobil Audi, diangkat menjadi menteri riset dan teknologi.⁵³ Sementara Chen Zhu, seorang *foreign associate* pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Nasional Amerika Serikat, diangkat menjadi menteri kesehatan. Kedua orang tersebut menjadi non-komunis pertama di pemerintahan sejak Cina Cina membuka diri dan mereformasi ekonomi pada tahun 1978.⁵⁴

Masuknya para sarjana membuat perkembangan menjadi jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Data dari kongres ke-15 PKC menunjukkan, dari 177

⁵² Ibid

⁵³ *Harian Kompas*, edisi 12 Desember 2005, hal. 34

⁵⁴ Ibid

anggota Komite Sentral 48,7 persen berlatar belakang pendidikan teknik. Hal ini menyebabkan pandangan orang-orang ini bersifat praktis, mekanistik, dan tidak terlalu peduli masalah kebudayaan atau ideologi. Para pemimpin Cina saat ini diduduki oleh orang-orang muda yang berpendidikan tinggi dan memiliki kemampuan untuk mengangkat harkat rakyatnya di tengah globalisasi yang semakin kompetitif. Kaum pemimpin muda Cina yang bersekolah diluar negeri akan memiliki sifat yang kritis dalam melihat perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Cina. Kemajuan dalam bidang ekonomi telah menyebabkan masyarakat Cina memiliki pemikiran yang lebih liberal dalam berbagai bidang. Akan tetapi proses menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis ini tidak dapat terjadi melalui suatu revolusi tetapi harus melalui suatu evolusi yang bertahap.

B. Peluang Demokratisasi

Menurut **B. N. Marbun, SH**, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang asas pendapatnya memberikan arah tujuan untuk kelangsungan hidup; prinsip-prinsip atau nilai yang mengarahkan secara sah tingkah laku masyarakat dan lembaga-lembaga politik.⁵⁵ Hal ini menunjukkan bahwa ideologi komunisme seharusnya berlaku dalam seluruh bidang di RRC, baik itu bidang sosial, bidang politik bahkan dalam bahkan bidang ekonomi. Akan tetapi sejak pemerintahan Deng Xiaoping, RRC mulai meninggalkan ideologi komunisme khususnya pada bidang ekonomi.

⁵⁵ B. N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1996, hlm. 212

Akan tetapi evolusi perubahan ideologi dari komunisme ke ideologi liberalisme harus berlangsung secara bertahap. Selama kurang lebih 10 tahun, pada awal Reformasi (1978-1987), pemimpin Partai Komunis Cina tidak berani mengganti ideologi resmi Partai maupun negara. Ketika para mahasiswa berdemonstrasi menuntut liberalisasi politik dan demokrasi, pada tahun 1989 Deng dengan tegas mengeluarkan fatwa tentang "Empat Prinsip Dasar," yang pada intinya tetap mempertahankan ideologi komunisme.

Pada awal tahun 1980-an Deng membuat kebijakan untuk mengembalikan hak milik pribadi dan kontrol negara atas sarana produksi dikurangi secara progresif.⁵⁶ Pembubaran komune dianggap sebagai tindakan yang paling kontroversial karena ini menyentuh 80% dari seluruh penduduk Cina. Mayoritas penduduk Cina bebas memiliki dan memakai alat produksi, dan juga menikmati hasil produksinya. Sementara itu di kota-kota negara membebaskan harga barang dan membiarkan ditentukan oleh hukum pasar.

Pada tahun 1987 diadakan pemilihan langsung di daerah pedesaan setiap tiga tahun untuk membentuk komite desa yang baru.⁵⁷ Komite desa itu mempunyai kekuasaan untuk memutuskan hal-hal penting, seperti persoalan tanah dan hak milik (*property rights*).

Fenomena ini tentu saja menghancurkan prinsip komunisme dan menimbulkan pertentangan ideologi karena secara resmi RRC dan PKC masih menyatakan diri sosialis, tetapi secara tidak resmi mempraktikkan sistem ekonomi

⁵⁶ *Harian Kompas*, edisi 12 Desember 2005, hal. 54

⁵⁷ *Ibid*

kapitalis. Akan tetapi karena kemajuan yang berhasil dicapai dalam bidang ekonomi menyebabkan kebijakan Deng ini dapat diterima oleh masyarakat RRC.

Tapi ini tidak mudah karena mendapat tantangan dari para pendukung ideologi komunisme. Mereka ingin ideologi komunisme tetap dipertahankan. Tetapi, Kelompok pendukung kebijakan kapitalisme berpendapat kalau basis ekonomi sudah berubah maka ideologi juga harus ikut diubah. Usul kelompok pendukung kebijakan kapitalisme tentu saja ditolak sebab, tidak hanya mereka harus berhadapan dengan kelompok pendukung ideologi komunisme, tetapi mereka juga harus berhadapan dengan Partai Komunis Cina, sebuah partai yang dibentuk berdasarkan ideologi komunisme.

Akan tetapi permasalahan ini dapat diatasi pada Kongres Partai ke-13 (1987), dengan ditetapkan penggunaan istilah baru dan kompromi, yaitu "sosialisme pada tahap awal" (*shehuizhuyi chujijieduari*). Untuk memwadhahi kegiatan ekonomi jenis baru ini perlu ada ideologi baru yang mengizinkan mekanisme pasar. Para pemimpin Partai menciptakan istilah baru, yaitu "ekonomi pasar sosialis" (*shehuizhuyi shichang jingji*). Hal ini dilakukan juga untuk membuktikan kepada komunitas internasional bahwa ada keterbukaan di RRC. Sehingga muncul kepercayaan dari komunitas internasional terhadap RRC.

Pada tahun 1997 ditegaskan sekali lagi "sosialisme pada tahap awal" pada Kongres Partai ke-15.⁵⁸ Pada tahap awal sosialisme ini, ekonomi dijalankan dengan mengurangi peran negara dan memperluas mekanisme pasar. Produksi,

⁵⁸ I. Wibowo, *Belajar dari Cina*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta: 2004, hlm. 83

distribusi, maupun konsumsi semuanya dijalankan dengan mengikuti hukum *supply and demand*.

Pada tahun 2007 diadakan Kongres Rakyat Nasional ke-17 di Balai Besar Rakyat, Beijing.⁵⁹ Dalam kongres yang diadakan tiap lima tahun ini, dibahas masa depan partai. Para pemimpin baru dari generasi yang lebih muda bakal dipromosikan ke posisi penting pemerintahan Cina. Selama pertemuan, kata 'demokrasi' kerap disebut para pemimpin Cina dalam pidato mereka. Tetapi masih tidak jelas apa yang mereka maksud dengan "demokrasi". Dalam pidatonya, Presiden Hu mengakui berbagai masalah yang tengah dihadapi Cina. Seperti kesenjangan antara warga kota yang kaya dengan warga desa yang miskin; kerusakan lingkungan, dan korupsi para pejabat partai. Standar kehidupan yang relatif baik untuk warga Cina sudah tercapai. Namun kesenjangan pendapatan antar warga belum diatasi.

Selain itu, Presiden Hu membahas pentingnya peningkatan demokrasi di dalam partai. Dia mendorong anggota partai untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Ia juga menegaskan, Cina tidak akan menerapkan sistem multi-partai. Selama pidato berlangsung, media *Daily's People* melaporkan, kata "demokrasi" digunakan sebanyak 60 kali.

Tapi, sebelum kongres berlangsung, juru bicara Li Dongsheng mengatakan pada jurnalis, visi Cina soal demokrasi, jauh berbeda dengan model demokrasi yang diterapkan di negara-negara Barat. "Kami sudah melihat semua hal yang

⁵⁹ Dikutip dari [http://www.asiacalling.com/Gaya Demokrasi Cina di Masa Depan](http://www.asiacalling.com/Gaya%20Demokrasi%20Cina%20di%20Masa%20Depan), diakses pada tanggal 26 Agustus 2008, pukul 18.00

dicapai sepanjang peradaban politik manusia. Tapi kami tidak akan pernah menerapkan sistem politik negara-negara Barat." Li Dongsheng mengatakan, reformasi politik Cina akan mencerminkan karakteristik negeri itu. "Dalam menerapkan reformasi politik, kami mempertimbangkan situasi nasional di Cina. Kami telah melakukan reformasi politik yang lebih dalam berdasarkan pengalaman kami sendiri."

Hu Xingdou, analis politik dan profesor di Institut Teknologi Beijing, mengatakan setiap negara memiliki versi demokrasinya masing-masing.⁶⁰ Dengan begitu, bentuk demokrasi apapun yang akan diterapkan di Cina, tentunya juga akan tergolong unik. Namun dia yakin, ada satu aspek demokrasi Barat yang patut dicermati para pemimpin Cina.

Inti dari demokrasi Barat adalah pengawasan dan pengaturan kekuasaan. Demokrasi adalah sistem yang melindungi hak warga negara. Aspek yang paling penting dari sebuah sistem politik adalah pembatasan kekuasaan pemerintah dan pejabat.⁶¹

Hu Xingdou mengatakan, langkah penting pertama menuju demokrasi adalah keterbukaan, serta pemilihan para pejabat pemerintah yang bisa diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat Cina. Dalam proses pemilihan pemimpin yang tertutup dari publik, para pemimpin tertinggi Partai Komunis menunjuk Xi Jinping (pemimpin Partai Komunis Shanghai) dan Li Keqiang (pemimpin Partai Komunis provinsi Liaoning) sebagai anggota baru komite politbiro. Perbedaan generasi antara Xi Jinping dan Li Keqiang dengan para pemimpin saat ini, membuat keduanya tidak memiliki pemikiran politik yang murni sama dengan

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Ibid

pemimpin Cina saat ini. Sehingga diharapkan Xi Jinping dan Li Keqiang akan menjadi pemimpin yang lebih liberal.

Sejak Cina membuka diri 30 tahun lalu, perekonomian negara telah berkembang pesat dan kehidupan rakyat semakin membaik dan sekarang waktu yang tepat untuk melakukan perubahan dalam bidang lainnya. Reformasi politik harus dilakukan seiring dengan reformasi ekonomi dan kedua belah pihak harus bekerjasama. Dengan begitu Cina akan semakin baik. Proses ini harus muncul dari dalam dan akan dilaksanakan secara bertahap.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

1. Sistem demokrasi model Cina akan berada dibawah koordinasi Partai Komunis Cina (PKC). Kebebasan dalam bidang politik akan diberikan secara bertahap kepada masyarakat Cina. Perubahan dimulai pada masa pemerintahan Deng Xiaoping dengan melakukan transformasi politik dan pemikiran, yang meliputi tindakan pengtahapan/selektif, proporsional, moderat, dan *Open Door Policy*, kemudian dilanjutkan oleh Jiang Zemin yang melakukan amandemen konstitusi, yaitu dengan memasukkan Teori "Tiga Perwakilan" ke dalam anggaran dasar partai. Teori "Tiga Perwakilan" ini menyebutkan bahwa komunis yang berkuasa di daratan Cina tidak hanya merupakan perwakilan dari kelas pekerja dan petani, tetapi juga massa luas termasuk di dalamnya kelompok kapitalis/pengusaha. Jiang menginginkan adanya cara berpikir baru dalam melihat berbagai perkembangan masyarakat Cina. Sedangkan Hu Jin Tao lebih berperan dalam menjaga keseimbangan agar perubahan yang dilakukan secara harmonis dan bertahap dalam bidang politik tidak mempengaruhi kemajuan yang telah dicapai dalam bidang ekonomi.
2. Nilai-nilai dan norma-norma sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat Cina akan memiliki pengaruh dalam sistem demokrasi model

Cina. Hal ini akan membuat sistem demokrasi model Cina berbeda dengan sistem demokrasi model Barat.

3. Kemajuan ekonomi, khususnya teknologi komunikasi, telah membawa pengaruh besar bagi proses keterbukaan masyarakat Cina. Tekad pemerintah mengendalikan seluruh ruang gerak masyarakat, yang mengacu pada prinsip totalisasi dan sentralisasi komunisme, semakin sulit untuk dipertahankan. Pemimpin RRC dan PKC masih bisa mengendalikan dan menyensor semua media yang bersifat konvensional, tetapi sulit untuk mengatur dan mengendalikan media alternatif. Pemerintah dapat melarang media cetak dan media elektronik untuk menyiarkan berita tertentu, tetapi dalam sekejap berita itu bisa menyebar luas melalui pesan singkat telepon seluler.
4. Demokratisasi di Republik Rakyat Cina (RRC), tidak dapat dilakukan melalui suatu revolusi atau tekanan keras dari komunitas internasional. Tingkat perekonomian RRC yang tinggi dan telah memberikan kemakmuran bagi sebagian masyarakatnya telah memberikan mereka akses kepada demokrasi, walaupun hal itu masih terbatas pada bidang ekonomi akan tetapi menjaga peluang negara tersebut untuk melangsungkan demokrasi. Modernisasi dan kesejahteraan secara ekonomi akan selalu disertai dengan sejumlah faktor yang kondusif bagi demokrasi. Meningkatnya tingkat melek huruf dan tingkat pendidikan, urbanisasi, dan pembangunan media massa akan menyadarkan masyarakat Cina akan arti penting demokrasi.

B. SARAN-SARAN

1. Pemerintah RRC dan Partai Komunis Cina (PKC) seharusnya dapat mengakomodasi kemajuan masyarakat Cina dalam bidang ekonomi dengan memberikan kesempatan yang lebih dalam bidang politik.
2. Karena adanya peluang RRC untuk menjadi negara superpower, RRC seharusnya menunjukkan kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap berbagai bidang, khususnya dengan memberikan kebebasan berpolitik bagi warga negaranya.
3. Untuk menghilangkan kekhawatiran yang ditimbulkan karena kemajuan ekonominya, RRC seharusnya dapat menunjukkan kerjasama, transparansi, dan lebih mengutamakan penyelesaian masalah lewat diplomasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Agung, Anak Banyu dan Yanyan Mochammad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Bakrie, Umar Suryadi, *Pasca Deng Xiao Ping: Cina Quo Vadis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Ching, Frank (Editor), *China in Transition: Towards the New Millennium*, Hong Kong: Review Publishing Company Limited, 1997
- Dharmawan, Bagus (Editor), *Cermin dari Cina: Geliat Sang Naga di Tengah Era Globalisasi*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, Maret 2006
- Djafar, Zainuddin, *Indonesia, Asean, dan Dinamika Asia Timur Kajian Perpektif Ekonomi-Politik*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2008
- Huntington, Samuel P, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Yogyakarta: Penerbit Qalam, Juni 2005
- Fishman, Ted C, *China Inc: Bagaimana Kedigdayaan China Menantang Amerika dan Dunia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006
- Kynge, James, *Rahasia Sukses Ekonomi Cina: Kebangkitan Cina Menggeser Amerika Serikat sebagai Superpower Ekonomi Dunia*, Bandung: Penerbit Mizan, Mei 2007
- Mas' oed Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990
- Rostow, *The Prospect for Communist China*, London: Chapman & Hall, Ltd., 1955
- Sargent, Lyman Tower, *Contemporary Political Ideologies*, Illionis: The Dorsey Press, 1986
- Sorensen, Georg, *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003

Sukisman, W. D., *Sejarah Cina Kontemporer Jilid 1*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992

Sukisman, W. D., *Sejarah Cina Kontemporer Jilid 2*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993

Townsend, James R., *Politics in China*, Boston: Little, Brown and Company, 1954

Wibowo, I., *Belajar dari Cina*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta: 2004

Yutang, Lin (Editor), *Belajar Demokrasi di Cina*, Bekasi: Lion Book, 2007

Zaehurrofik, *China Naga Raksasa Asia: Rahasia Sukses China Menguasai Dunia*, Yogyakarta: Garasi, 2008

MEDIA CETAK

_____, *Pertemuan PECC: China, Memaksa Semua Negara untuk Siaga*, Kompas 10 Mei 2007, hal 34.

"*China's Economic Growth Cools to Slowest Since 2005*", Bloomberg L.P., 17 Juli 2008

"*The political economy of guidance planning in Post-Mao China.*", Review of World Economics, 1 Oktober 2007

Harian Kompas, Edisi Kamis 31 Maret 2003, hal. 34.

Harian Kompas, Edisi 24 Desember 2003, hal 55.

Harian Kompas, Edisi 12 Desember 2005, hal 54.

Harian Kompas, Edisi 12 Desember 2005, hal 55.

Harian Kompas, Edisi Rabu 29 Maret 2006, hal 37.

"*Reducing Inequalities in China Requires Inclusive Growth*", Asian Development Bank, News Release, 9 August 2007

INTERNET

_____, <http://www.ft.com/cms/s/0/dec3a0d2-9218-11dc-8981-000079fd2ac.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2008, pukul 21.00

- Belajarlah dari China*, <http://paramadina.wordpress.com/2007/03/04/belajarlah-dari-china>, diakses pada tanggal 1 November 2008, pukul 17.00
- China Master of the Universe?* <http://osdir.com/ml/culture.mayapada/2006-10/msg00249.html>, diakses pada tanggal 14 Maret 2008 pukul 21.00
- Dewi Demokrasi*, http://ms.wikipedia.org/wiki/Dewi_Demokrasi, diakses pada tanggal 20 Agustus 2008 pukul 21.00
- Democracy*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2008 pukul 21.30
- Gaya Demokrasi Cina di Masa Depan*, [http://www.asiacalling.com/Gaya Demokrasi Cina di Masa Depan](http://www.asiacalling.com/Gaya_Demokrasi_Cina_di_Masa_Depan), diakses pada tanggal 26 Agustus 2008, pukul 18.00
- List of Countries by Percentage of Population Living in Poverty*, [http://en.wikipedia.org/list of countries by percentage of population living in poverty](http://en.wikipedia.org/list_of_countries_by_percentage_of_population_living_in_poverty), diakses pada tanggal 26 Agustus 2008, pukul 21.30
- List of Socialist Countries*, [http://en.wikipedia.org/list of socialist countries](http://en.wikipedia.org/list_of_socialist_countries), diakses pada tanggal 26 Agustus 2008, pukul 18.00